

A.A. NAVIS

Alam
Terkembang
Jadi Guru

ADAT DAN KEBUDAYAAN MINANGKABAU

grafitipers



Alam
Terkembang
Jadi Guru

ADAT DAN KEBUDAYAAN MINANGKABAU

A.A. NAVIS

Alam Terkembang Jadi Guru

ADAT DAN KEBUDAYAAN MINANGKABAU



**ALAM TERKEMBANG JADI GURU
Adat dan Kebudayaan Minangkabau**

© A.A. Navis

No. 16/84

Pengantar: Dr. Taufik Abdullah

Pendesain Grafis & Kulit Muka: T. Ramadhan Bouqie

Penerbit PT Pustaka Grafitipers
Pusat Perdagangan Senen Blok II, Lantai III
Jakarta 10410
Anggota IKAPI

Cetakan Pertama 1984
Cetakan Kedua 1986

Percetakan PT Temprint, Jakarta

PENGANTAR PENERBIT

Adat Minang merupakan salah satu adat yang unik di Indonesia, antara lain karena sifat matrilineal yang ada pada masyarakat itu. Beberapa buku dan telaah tentang adat Minang telah diterbitkan, namun rasanya masih ada saja yang "tertinggal" tidak tersampaikan atau tercatat. Dan tidak jarang yang "tertinggal" itu ternyata penting, atau setidaknya menarik, untuk diketahui.

Dalam buku yang disusun A.A. Navis ini, hal-hal yang penting dan menarik tentang adat Minang itu banyak ditemukan. Di samping sebagai budayawan, Navis adalah seorang sastrawan; dan buku ini pun ditulis dengan gaya yang lancar dan berkadar informasi tinggi. Kami yakin, buku ini akan bisa menambah pengetahuan kita tentang adat Minang pada khususnya, dan kebudayaan Indonesia pada umumnya. Dan karangan Navis ini mungkin malah bisa menjadi salah satu buku baku tentang adat dan kebudayaan Minang.

Jakarta, Juli 1984

Daftar Isi

Pengantar Penerbit	VII
"Studi Adat sebagai Pantulan Perubahan Sosial di Minangkabau" oleh Taufik Abdullah	IX
Pengantar Penulis	XXV
Sejarah	1
Tambo	45
Falsafah Alam	59
Undang-undang dan Hukum	85
Penghulu	119
Harta dan Pusaka	149
Rumah Gadang	171
Perkawinan	193
Kesusastraan	229
Permainan Rakyat	263
Daftar Bacaan	285
Indeks	291

Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial di Minangkabau

Tentu saja soalnya terletak pada cara pendekatan. Kalau pendekatan saya dipakai, maka salah satu indikator untuk menentukan bahwa proses melemahnya kemantapan tradisional telah bermula ialah ketika peserta (*participant*) kebudayaan mulai secara kreatif mempersoalkan tuntutan dari dasar nilai kulturalnya.

Kelanjutan proses itu akan makin jelas di saat mereka mencoba pula membuat jarak dengan dasar nilai kultural itu dan secara sadar mencoba menerangkan apa makna yang sesungguhnya dari dasar nilai itu. Dengan kata lain mereka bukan saja tidak membiarkan diri terlarut dan terkulai dalam keberlakuan dasar nilai kultural, tetapi bahkan juga ingin merangkul lebih keras. Mereka sebagai peserta makin sadar, bahwa nilai dasar yang dimiliki itu merupakan sesuatu yang berharga untuk selalu dipelihara. Dalam situasi seperti inilah biasanya patokan-patokan dasar nilai kultural tersebut diperjelas. Dengan begini dasar nilai itu di satu pihak secara rasional bisa dimengerti, dan di pihak lain ia dijadikan pula sebagai ukuran dalam menghadapi dan menjalankan perubahan. Sikap inilah biasanya disebut tradisionalisme – perubahan yang terjadi semestinyalah berlandaskan pada kelanjutan berlakunya tradisi.

Tentu bisa diduga bahwa tradisionalisme mengandung unsur-unsur konflik yang kadang-kadang juga tak terlalu mudah diatasi. Sampai dimanakah perubahan itu masih sah, tanpa mengorbankan keberlanjutan berlakunya nilai dasar tradisional. Sebaliknya revisi apakah yang harus dilakukan untuk meniadakan akibat negatif dari perubahan struktural, baik yang bersumber dari

dalam ataupun yang dipaksakan dari luar, yang tak terelakkan? Maka berbagai pasangan konflik pun bermunculan. Masyarakat yang sedang mengalami proses "detradisionalisasi" itu seakan-akan merupakan jaringan-konflik yang saling berkaitan. Namun jarang suatu konflik yang demikian sentral sehingga mengancam polarisasi sosial yang keras. Sebab konflik yang satu — antara dua golongan pendapat — bisa dilunakkan oleh konflik yang lain, ketika komposisi dari pro dan kontra telah berbeda. Jadi sesungguhnya kemajemukan konflik tersebut bukan saja bisa merupakan faktor pembendung proses disintegrasi sosial, tetapi juga sering menjadi unsur yang sangat menentukan bagi terjaganya integrasi. Karena itulah proses detradisionalisasi ini — suatu proses yang tentu saja tak terlepas dari perubahan sosial-ekonomis yang terjadi — bisa berlangsung lama. Seandainya suatu perubahan tanpa diinginkan terjadi, maka perubahan itu harus dilihat sedemikian rupa sehingga bukan saja secara kultural bisa dimengerti, tetapi juga pemasukannya ke dalam perbendaharaan kultural tidaklah merusak. Dengan ini *chaos* ingin dihindarkan dan dengan ini pula keberlakuan yang berlanjut dari nilai dasar tradisional ingin dipertahankan.

Tentu saja apa yang saya bicarakan di atas lebih merupakan suatu gejala intelektual. Kesemuanya lebih merupakan pergumulan para cendekiawan, para peserta kebudayaan yang paling sadar, untuk selalu ingin memberi makna terhadap dunia sendiri dan yang mengitari diri. Meskipun gagasan di atas memberi kesan bahwa saya ingin memberikan bentukan teoritis terhadap gejala yang dihadapi masyarakat tradisional ketika berhadapan dengan perubahan struktural yang terjadi, tetapi saya tidaklah bertolak dari pemikiran spekulatif. Hal-hal di atas berasal dari hasil observasi saya atas peristiwa sosial-kultural Sumatera Barat di awal abad 20 ini.

Tentu saja situasi itu tidaklah muncul begitu saja. Gerakan Padri yang kemudian meletus menjadi "perang saudara", yang terjadi di awal abad 19, telah memaksa masyarakat Minangkabau merevisi lagi definisi dari dunianya, dari "alam Minangkabau". Bagaimanakah hal-hal yang paradoksal dari dasar kultural harus secara kreatif diselesaikan? Pencarian definisi yang sesuai ini tidaklah sekadar usaha untuk menemukan dasar "ideologi" yang baru yang bisa selesai pada tingkat formalnya. Definisi baru tersebut langsung menyentuh hal-hal yang bersifat struktural. Meskipun pemurnian kehidupan keagamaan¹ merupakan tujuan utama gerakan Padri, hasil akhir yang ingin ditemukan ialah suatu "alam Minangkabau" yang baru, yang diredhai dan

1 Mengenai aspek "pemurnian agama" dari gerakan Padri, lihat umpamanya H.A. Steyn Oarve, "Kaum Padari (Padri) di Padang Darat Pulau Sumatera" (terj.) dalam Taufik Abdullah (ed.) *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1979: 108-127. Lihat juga memoir Fakih Saghir, yang terkenal sebagai Syekh Jalaluddin, salah seorang ulama yang terlibat dalam konflik agama ini. Syekh

yang haq.

Saya tak tahu bagaimana jadinya Minangkabau jika Belanda tak campur tangan dalam Perang Padri ini. Tetapi sementara perang itu mengalami transformasi — dari pergolakan kultural menjadi perang kolonialisme — suatu definisi baru makin memperlihatkan dirinya. "Alam Minangkabau" tidak saja harus dianggap sebagai dunia yang berlandaskan adat dan Islam, tetapi hirarki dari keduanya telah pula diperjelas. Tidak lagi adat dan Islam yang paling mendukung, tetapi "adat bersandar syarah. Syarah bersandar Kitabullah." Selanjutnya dikatakan bahwa "agama mengata, adat memakai".² Maka sejak itu pemantulan struktural dari definisi kultural ini adalah merupakan salah satu tema pokok dalam sejarah Minangkabau. Dari sudut kekuasaan dan kewenangan, rumusan kultural ini mempertanyakan wibawa siapa yang harus lebih berfungsi dan kata siapa yang harus lebih memutus. Pemasukan unsur keulamaan ke dalam struktur kekuasaan, yang diwujudkan dalam keanggotaan di dalam *balai adat*, ternyata hanyalah merupakan pelebaran dari elite kekuasaan. Sedangkan esensi keulamaan tertinggal di luar. Keulamaan, yang bertolak dari penguasaan ilmu dan pengakuan sosial, tak bisa terlibat dalam proses pewarisan jabatan dengan memakai patokan matrilineal itu. Dari sudut sistem pewarisan masalahnya bahkan lebih pelik. Berbagai konflik yang terjadi makin memperlihatkan betapa "nikmatnya" hidup dalam kemajemukan hukum.³

Konflik terbuka kadang-kadang terjadi dan perdebatan terus berlanjut. Apalagi di samping itu masalah pemurnian (orthoksi) agama makin lama makin menonjol pula. Dalam hal ini yang dipermasalahkan tidaklah sekadar definisi "alam Minangkabau" tetapi sistem perilaku dan kebersihan keyakinan keagamaan dari noda-noda yang bisa mengurangi kemutlakan ke-Esa-an Allah. Betapapun fundamental dan mendasarnya hal-hal ini, kesemuanya bersumber dari dinamik kebudayaan sendiri. Masalahnya menjadi sangat berbeda ketika tantangan yang dihadapi bukan bertolak tiang-tiang "alam Minangkabau" sendiri. Soalnya menjadi lain sekali di saat tantangan yang datang itu

Djilal-eddin. *Verhaal van der aanvang der Padri onlusten op Sumatra* (diselenggarakan oleh Dr. J.J. Hollander). Leiden 1837. Ditulis dalam bahasa Melayu ("gaya" Minangkabau) huruf "Jawi", memoir ini pernah ditranskripsikan oleh M. Radjab untuk keperluan Seminar Kebudayaan Minangkabau 1970. Studi terhadap memoir ini dilakukan oleh Christine Dobbin, "Islamic Revivalism in Minangkabau at the Turn of the Nineteenth Century", *Modern Asian Studies*, 8,3 (1979): 319-356. Lihat juga M. Radjab, *Perang Padri*. Jakarta: Balai Pustaka, 1954.

2 Taufik Abdullah, "Adat and Islam": An Examination of Conflict in Minangkabau", *Indonesia*, 2 (October 1966): 1-24.

3 Mengenai hal ini telah cukup banyak studi yang dihasilkan. Yang terakhir dan paling lengkap ialah Franz von Benda-Beckman, *Property in Social Continuity*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1975.

Tentang corak konflik di Minangkabau, lihat Nancy Tanner, "Disputing and Dispute Settlement Among the Minangkabau of Indonesia", *Indonesia*, 8: 21-67.

berasal dari kekuasaan asing. Perang Padri ternyata tidak saja berakhir dengan didapatkannya suatu definisi baru tentang "alam Minangkabau", yang serta merta juga menuntut pemecahan dalam sistem sosial dan hukum, tetapi juga, dan lebih mudah dilihat dan dirasakan, bercokolnya dominasi politik dan meliter Belanda. Dengan dominasi corak hubungan yang bersifat atasan-dan-bawahan pun makin pula memperlihatkan dirinya.⁴ Inilah suasana yang jelas dirasakan di awal abad 20.

Berhadapan dengan situasi baru ini, beberapa penghulu adat Minangkabau, para *literati*, yang tinggal di kota, berhadapan langsung dengan situasi dominasi ini, mulai secara bersungguh-sungguh merenung tentang hakikat "alam Minangkabau" dan tuntutan-tuntutan kultural yang terlekat di dalamnya. Dalam mempertentangkan tuntutan kultural ini dengan kesempatan yang terbuka dalam situasi baru yang dipaksakan dari luar itu, perenungan tersebut tidaklah dibiarkan untuk menjadi kontemplatif yang melarikan diri. Perenungan itu bahkan menjadi agenda untuk tindakan yang dilakukan. Maka berbagai kegiatan pun dijalankan. Sekolah kerajinan wanita didirikan, surat kabar (termasuk sebuah surat kabar wanita) diterbitkan, dan studi-studi-fonds digerakkan. Pada waktu itu barangkali tak ada kata yang lebih populer daripada "kemajuan", demi mencapai "dunia maju". Bukankah Minangkabau masyarakat matrilineal? Kalau begitu, mestinyalah wanita bersekolah. Bukankah tuntutan bagi putra Minangkabau untuk "meninggikan semarak Gunung Merapi?" Sebab itu mengapa tidak terjun dalam perlombaan untuk mendapatkan "kemajuan"? Begitu kata ajaran adat, demikian pula *tambo* melukiskan dan bahkan *kaba* telah memberi contoh bagaimana jadinya jika ketentuan itu diingkari. Sementara itu dari pihak lain, yang bertolak dari tiang "alam Minangkabau" yang satu lagi, Islam, bukan saja menginginkan berlanjutnya pemurnian dalam kehidupan keagamaan, tetapi juga menjadikan agama sebagai dasar yang kokoh bagi "kemajuan". Dalam suasana yang tampaknya serba optimis ini, konflik tak terelakkan. Kemajuan? Tetapi sampai di mana? Kemajuan barulah benar dan dibenarkan jika ia sadar akan batas antara "haram" dan "halal", antara haq dan bathil.⁵ Belum lagi jika dipertimbangkan pula reaksi mereka yang menentang peralihan dari tata cara "nenek moyang kita". Maka bukan saja perdebatan yang terjadi, segala makian pun diobral — setidaknya demikianlah yang terpantul dalam tulisan-tulisan di surat-surat

4 Tentang "pemecahan kultural" terhadap masalah politik yang tak teratasi ini, lihat Taufik Abdullah, "The Making of the schakel society" dalam *Conference on Modern Indonesian History* (July 18-19, 1975). Madison: Center of Southeast Asian History, University of Wisconsin, 13-25. Dimuat juga dalam *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*, VI, 3 (Agustus 1976): 13-30.

5 Situasi, digambarkan dalam Taufik Abdullah "Modernization in the Minangkabau world: West Sumatra in the Early Decades of the 20th Century" dalam Claire Holt et.a. (eds.), *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca, London: Cornell University Press, 1972, 179-245.

kabar.

Dari situasi kompleks yang selintas terlukis di atas, saya memang ingin mengatakan bahwa perenungan yang kreatif terhadap tradisi bukan saja menghasilkan agenda tindakan, tetapi juga kontrol sampai di mana perubahan itu harus berjalan. Dorongan dan sekaligus pembatasan yang diberikan tradisi menghasilkan suasana intelektual dan sosial yang tak selalu menenteramkan. Dalam suasana inilah pendidikan Barat, ataupun Islam "modern" berkembang cukup pesat di Minangkabau. Suasana ini bukan saja menyebabkan dimulainya tradisi merantau yang baru, yaitu menuntut ilmu modern ke Jawa, atau bahkan ke Negeri Belanda, tetapi juga, menurut statistik pemerintah Hindia Belanda, menjadikan Minangkabau sebagai "daerah Islam" yang paling berpendidikan. Namun suasana ini juga yang melatarbelakangi berbagai kegiatan politik, mulai dari pemberontakan-pemberontakan kecil (1908) dan yang dibesar-besarkan dengan sebutan pemberontakan komunis di Silungkang (1927), sampai dengan aktivitas partai-partai radikal di tahun 1930-an.

Dari sudut sejarah intelektual, maka ada dua aspek yang segera tampil di hadapan saya. Pertama, di samping merupakan kancah perdebatan tentang bagaimanakah bentuk dan corak "kemajuan" yang baik itu, suasana yang diuraikan di atas memberikan pula bentuk literer dari perdebatan itu sendiri. Saya kira "sastra protes" yang dilahirkan para terpelajar Minangkabau, yang biasa pula dianggap sebagai pelopor sastra Indonesia modern, bisa dikembalikan kepada suasana sosial-kultural yang terjadi sejak awal abad ini.⁶ Bukankah tragedi yang banyak dilukiskan itu berkisar pada ketidaksediaan untuk menerima akibat logis dari sikap yang telah terbuka terhadap "dunia maju"? Merantau lah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi, tetapi sadarlah bahwa ninik-mamaklah yang memungkinkan itu semua, dan pada ninik-mamak pulalah kepatuhan harus diberikan. Ke rantau hanya selama "di rumah berguna belum". Rantau hanyalah peralihan sementara, begitu secara fisik, demikian pula dalam panggilan kultural. Dan bagi saya, salah satu ketinggian nilai *Salah Asuhan* dari Abdul Muis sebagai dokumen sosial, ialah kemampuannya melukiskan tragedi keterombang-ambing "dorongan" dan "hambatan" dari tradisi. Tetapi baiklah hal ini saya pulangkan saja pada berbagai studi sastra yang telah dijalankan dan pada ahli serta kritikus sastra.⁷ Hal yang kedualah, pada

6 Tentang literatur itu sendiri, lihat antara lain A. Teeuw, *Modern Indonesian Literature*, Vol. 1. Tentang kemungkinan hubungan suasana sosial dengan salah satu novel, *Siti Nurbaja*, telah saya bicarakan dalam komentar singkat saya terhadap tulisan Harry Aveling ("Siti Nurbaja": Some reconsiderations"), *Bijdragen*, 126. 2 (1970): 242-248.

7 *Salah Asuhan* adalah satu novel Indonesia yang paling banyak dijadikan sasaran studi khusus. Antara lain, David de Queljo, *Marginal Man in a Colonial Society: Abdoel Moeis' "Salah Asuhan"*. Athens, Ohio: Ohio University Center for Romantic Tradition in the Early Indonesian Novel", *Modern Asian Studies*, Vol. 2 (April 1973): 179-192.

kesempatan ini, yang lebih menarik perhatian saya.

Aspek yang kedua ialah berlanjutnya usaha untuk mengerti konsep ideal atau nilai-nilai dasar yang diberikan tradisi. Hal ini juga diteruskan dengan usaha untuk menerangkannya dengan secara rasional. Simbol-simbol yang sering terpantul dalam *tambo* ditafsirkan sehingga bisa sesuatu yang lebih *plausible*, yang kemungkinan kesejarahannya diperkirakan bisa masuk akal. Legenda dan mithos tidak hanya dibiarkan berbicara melalui simbol-simbol kultural yang telah berakar, tetapi dijadikan eksplisit. Misteri ingin dihilangkan, bukan dengan memperlihatkan realitas yang telah diselimutinya, tetapi, terutama, mencari moral yang mendasarinya. Begitu sejak awal abad XX, ketika tradisi mulai direnungkan, sampai kini, berbagai buku telah ditulis, sekian perdebatan telah dilakukan, dan entah berapa pula pertemuan ilmiah ataupun "setengah ilmiah" yang telah dijalankan. Kesemuanya memperlihatkan usaha mengerti dan menerangkan lagi dasar-dasar konseptual dari "alam Minangkabau".

Karena kecenderungan intelektual ini cukup penting untuk mengerti masyarakat dan kebudayaan Minangkabau, barangkali tak ada salahnya saya memberikan berbagai ilustrasi. Ketika Sekolah Raja (*Kweekschool*) di Bukittinggi merayakan lustrumnya di awal abad ini, maka murid-muridnya mengadakan pertunjukan sandiwara, yang konon sangat memuaskan para hadirin. Mereka mementaskan bagian-bagian yang paling menarik dari *Kaba Cindua Mato*.⁸ Sukses ini diulang lagi oleh berbagai sekolah dan organisasi pemuda, seperti Jong Sumatranen Bond, di dalam ataupun di luar Sumatera Barat. Bahkan Abdul Muis ketika masih asyik dalam Sarekat Islam, pernah pula menulis drama dari *kaba* ini. Di samping *Cindua Mato*, ternyata yang paling populer di kalangan pelajar, selama dasawarsa kedua sampai dengan keempat dari abad ini, ialah *Kaba Sabai Nan Aluih*. Konon, menurut cerita orang tua-tua, di awal tahun 1920-an, si penyair-politikus, Rustam Effendy, pernah menjadi "bintang pentas" dari *kaba* ini di Sumatera Barat. Drama yang berbahasa Indonesia dari *kaba* ini pernah ditulis oleh A.K. Gani, mahasiswa kedokteran, yang pernah main film, kemudian aktif dalam Gerindo, partai nasionalis yang radikal.

Tetapi apa artinya ini semua? Abdul Muis mungkin bisa memberi jawaban. Ia mengatakan, drama *Cindua Mato* sengaja ditulisnya agar kaum terpelajar menyadari bahwa kehidupan demokrasi telah berurat-berakar dalam kebudayaan kita. Jadi tidaklah terlalu mengherankan jika alasan yang sama dipakai pula oleh Datuk Sutan Maharadja ("Bapak Jurnalistik Melayu," kata Van

8 Berbagai edisi dari *kaba* ini diterbitkan. Edisi terakhir, yang belum selesai, ditulis oleh M.R. Manggis Datuk Radjo Panghoeloe, *Cindue Mato*. Bukittinggi: Pustaka Saadiah, 1973(?). Studi anthropologis pendek tentang *kaba* ini telah ditulis oleh Taufik Abdullah, "Some Notes on the *Kaba Tjindue Mato*: An Example of Minangkabau Traditional Literature", *Indonesia*, 9 (April 1970): 1-22.

Ronkel)⁹ ketika ia, sebagai penghulu adat yang berasal dari *Luhak Nan Tiga*, mengadakan "revolusi adat" di Padang, di awal abad ini. Dengan "revolusi" ini ia dan kawan-kawannya dari pedalaman (dari *darek*, istilahnya) menantang Tuanku Regen dan para bangsawan Padang, yang dikatakan telah mengikuti adat-Aceh, yang mengenal hirarki kebangsawanan. Jadi tak "demokratis". Dan artinya juga tak "modern" dan bukan pula "Minangkabau".¹⁰

Dan sudut inilah barangkali usaha memperkenalkan dan mempopulerkan *kaba* dan *tambo* bisa pula dilihat. Mungkin benar pula anggapan yang mengatakan bahwa *Kaba Sabai Nan Aluih* tidaklah sesuai dengan struktur masyarakat Minangkabau. Tetapi masalahnya bukan pada *plot* dan juga bukan pula pada wadah sosial dalam mana *plot* itu bermain yang lebih penting, tetapi pada pesan moral yang ingin disampaikan. Maka apa yang lebih sesuai daripada kisah si Sabai, yang lemah-lembut, tetapi tegas — "semut terinjak tak mati, alu bertarung patah tiga" — untuk menekankan pentingnya harga diri? Dan bukanlah hal yang aneh jika *kaba* ini sangat populer di kalangan terpelajar di saat perdebatan dengan "kaum kuno" sedang menjadi-jadi.

Peneguhan moral tradisional dalam menghadapi dan menjalani perubahan "demi kemajuan", adalah salah satu corak dari kecenderungan intelektual yang telah saya singgung di atas. Dalam hal ini pulalah penciptaan *Kaba Rancak di Labueh* bisa dilihat.¹¹ *Kaba* bersajak karangan Datuk Paduko Alam (ahli adat yang sangat terkemuka dari Payakumbuh) ini, bukan saja contoh dari puisi indah yang dihasilkan oleh kebudayaan yang rhetoris, seperti Minangkabau, tetapi juga adalah *expose* dari ajaran moral Minangkabau menghadapi zaman peralihan. Dan dalam hal ini Datuk Paduko Alam tidaklah sendirian. Mungkin terasa berlebih-lebihan, tetapi kalau diperhatikan, 'sastra protes', yang entah karena apa sering disebut antiadat itu, sering sekali memakai moral lama sebagai alat perlawanan kesewenang-wenangan wibawa dan kekuasaan adat atau orang tua. Jadi 'sastra protes' itu lebih merupakan suatu tuntutan terhadap sistem perilaku daripada gugatan terhadap struktur dan dasar moralnya.

Penerbitan buku-buku dan tulisan tentang adat dan *tambo* dan kadang-kadang diikuti dengan penekanan akan keberlakuannya dalam zaman sekarang adalah corak kedua. Dengan dasar inilah antara lain Datuk Sutan Maharadja¹² menerbitkan surat kabar *Oetoesan Melajoe* (1913-1922), *Soenting*

9 Ph.S. Van Ronkel, *Rapport Betreffende de Godsdienstige Verschijnselen ter Sumatra's Westkust*. Batavia: Landsdrukkerij, 1916.

10 B. Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatra Barat*. Jakarta: Bhratara, terjemahan dari "Bijdrage tot de Bibliographie van thuidige Godsdienstige beweging ter Sumatra's Westkust". *Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap*, 59 (1920): 249-325.

11 A. Johns telah menerjemahkan dengan indah *kaba* ini ke dalam bahasa Inggris. A. Johns, *The Kaba Rantjak Dilabueh: A Specimen of Traditional Literature of Central Sumatra*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1958.

12 Lihat Taufik Abdullah "Modernization".

Melajoe (1915), surat kabar wanita yang "resminya" dipimpin oleh putrinya, Ratna Djoewita, dan Rohana Kudus ("Kartini dari Sumatra").¹³ Dalam kedua surat kabar tersebut Datuk ini dan kawan-kawannya tak henti-hentinya menggauli adat Minangkabau, sebagai pola ideal untuk bertindak dan memperlihatkan "keagungannya" dalam menghadapi zaman baru. Dalam surat kabar *Oetoesan Melajoe* diskusi adat diadakan antara para ahli adat. Dalam surat kabar ini pula Datuk Sutan Maharadjo, menyerang para terpelajar Barat yang telah melepaskan "pusaka nenek moyang kita", Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Katemanggungan (perumus legendaris dari adat Minangkabau).

Datuk Sutan Maharadjo, pendiri pertama dari partai-adat, adalah pula pelopor dalam usaha memperkenalkan norma adat dan *tambo* alam Minangkabau kepada masyarakat, yang makin mengenal tulis-baca. Hal ini pulalah yang dilakukan oleh Datuk Sanggoeno Diradjo. Otoritasnya dalam hukum adat cukup diakui sehingga bukunya dipakai oleh Schrieke sebagai pegangan dalam menguraikan masyarakat Minangkabau yang sedang dilanda krisis akibat peralihan sosial-ekonomis.¹⁴

Dengan gaya yang berbeda dan temperamen yang tak pula sama serta corak aktivitas juga berlainan, saya kira Datuk Sutan Maharadjo dari Sulit Air, Datuk Paduko Alam dari Payakumbuh, dan Datuk Sanggoeno Diradjo dari Sungayang (Batusangkar), adalah tiga dari tokoh *literati* Minangkabau yang paling kreatif pada perempat pertama dari abad ini. Setidaknya merekalah yang memelopori dalam usaha perumusan moral, ajaran, dan hukum adat Minangkabau dengan memakai media modern dan dengan sadar pula mengarahkan pembicaraan mereka yang sedang mengalami proses urbanisme. Dengan begitu mereka, terutama Datuk Sutan Maharadjo, yang tak pernah sempat menyelesaikan satu pun buku yang lengkap, dan Datuk Sanggoeno Diradjo, yang menulis beberapa buku,¹⁵ meletakkan dasar bagi penulisan adat Minangkabau yang "modern". Tetapi kecenderungan yang sangat keras Datuk Sutan Maharadjo untuk menandakan identifikasi adat dengan ajaran tharekat (antara lain Martabat Tujuh) serta kecurigaannya terhadap segala pikiran dan perubahan yang dianggapnya telah menodai "adat yang sesungguhnya", menyebabkan ia terlibat dalam perdebatan yang tak henti dengan golongan Kaum Muda, yaitu para reformis Islam dan pemuda terpelajar Barat. Usaha Datuk Sanggoeno

13 Tentang Rohana Kudus sebagai pelopor gerakan wanita di Sumatera Barat, lihat Tamar Djaja, *Rohana Kudus: Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: Penerbit Mutiara, 1980. Ia adalah kakak tertua dari Sutan Sjahrir.

14 B. Schrieke. "The Causes and Effects of Communism on the West Coast Sumatra", dalam *Indonesian Sociological Studies*. The Hague/Bandung: W. van Hoeve, 1955. Part One.

15 Buku-buku Datuk Sanggoeno Diradjo antara lain:

1. *Tjoerai Payaran Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau*, Fort de Kock, 19..
2. *Kitab Perjatoeran Adat Lembaga Alam Minangkabau*, 2 jilid. Fort de Kock, 1923.
3. *Moestiko Adat Alam Minangkabau* (Jakarta: Balai Pustaka, 1953).

Diradjo untuk memperkenalkan kategorisasi baru tentang adat dan "menghilangkan" misteri dari *tambo*, sehingga diharap agar lebih merupakan suatu "sejarah", serta merta mendapat tanggapan yang keras dari Abdul Karim Amaroellah Al danawi (Dr. Syekh A. Karim Amarullah, ayah almarhum Buya Hamka). Ulama ini menentang kategori-kategori adat yang dikemukakan oleh Datuk Sanggoeno Diradjo, yang menurut pikirannya seakan-akan melupakan proses Islamisasi yang berkelanjutan dalam dunia pemikiran adat. Ia juga mengejek usaha "rekonstruksi" sejarah dari *tambo*, yang dirasakannya bukan saja salah dari sudut "kenyataan historis", tetapi juga tak benar dari sudut logika.¹⁶

Masa awal dari usaha peneguhan adat di saat perubahan sosial, yang dirasakan telah memperlihatkan akibatnya, memang dipenuhi oleh perdebatan. Masalahnya bukan saja sekadar untuk mempertahankan "adat lama, pusaka usang", tetapi juga menemukan moral tradisi yang lebih sesuai. Ketika berbagai ketentuan hukum adat sudah tak lagi berlaku — "*dahulu adat nan bayakai, kini rodi nan paguno*" — dan di saat pranata kekuasaan adat telah makin tak berarti, maka keinginan untuk merangkul adat, sebagai simbol dari ke-Minangkabau-an, makin mendesak. Dalam usaha ini pluralisasi sosial yang telah bermula sebagai akibat langsung dari dominasi politik dan ekonomi Belanda, juga menimbulkan dirinya. Inilah salah satu faktor terjadinya perdebatan tersebut. Jadi yang dihadapi para pendukung adat bukanlah sekadar situasi kultural yang makin berubah, tetapi juga telah adanya kelompok-kelompok sosial tertentu — yang memang masih sangat kecil — yang menyangsikan keabsyahan mereka sebagai perumus adat yang sesungguhnya. Apa yang harus mereka lakukan tidak sekadar perekaman kembali dasar-dasar ideal adat dan perumusannya yang lebih sistematis, tetapi juga proses ideologisasi adat. Dengan begini sistematisasi dari nilai-nilai dan norma-norma adat makin disempurnakan dan peranan adat Minangkabau sebagai kerangka konseptual makin diperkuat. Bukanlah apa yang sesungguhnya terjadi yang harus dikemukakan, tetapi apa yang "semestinya harus begitu" yang mesti ditegaskan.

"Adat hanyalah selingkung aur," kata pepatah. Maksudnya, dalam realitas hidup sehari-hari setiap nagari mempunyai adat dan kebiasaannya yang

16 Abdul Karim Amrullah Alddanawi, *Kitab Pertimbangan Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau*, 2 jilid, Fort de Kock: Snelpersdrukkerij "Agama", 1921. Buku ini adalah kritik terhadap tulisan Datuk Sanggoeno Diradjo, *Tjoerai Paparan Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau*. Atas kritik ini Datuk Sanggoeno Diradjo membalas dengan buku baru, *Kitab Perjatoeran Adat Lembaga Alam Minangkabau*, 1923. Di samping itu Datuk ini mengadukan ke pengadilan Abdulkarimalias-H. Rasul dengan tuduhan plagiat. Soalnya ialah sebelum mendebat apa yang dikatakan oleh Datuk Sanggoeno Diradjo. H. Rasul lebih dulu menyalin secara utuh paragraf-paragraf yang ingin didebatnya — tanpa izin pengarang dan penerbit. Tentang kasus ini lihat HAMKA. Djakarta: Djajamurni, 1962.

bah banyak para penulis buku-buku adat, terutama yang memakai *tambo* sebagai ancang-ancang penulisannya, untuk mempergunakan informasi (yang memang tak terlalu mendalam) dari hasil penemuan sarjana-sarjana asing. "Maharaja Alif", yang konon raja Minangkabau di abad 17, mulai dikenal, sebagai pengaruh laporan von Bazel dari abad ke 18, yang dimuat dalam *Encyclopedia van Nederlandsch-Indie*.¹⁹ Demikian juga halnya dengan nama Adityawarman, pangeran dari Majapahit yang menjadi raja di Minangkabau di abad ke 14.²⁰ Di samping itu peristiwa-peristiwa historis yang terjadi sejak Perang Padri mulai pula dipertimbangkan. Dari sudut hukum adat, sebagian dari buku-buku tersebut secara populer mengutip pula pendapat atau klasifikasi yang diperkenalkan oleh ahli hukum adat, van Vollenhoven, dan sebagainya.

Dalam kelompok yang ingin lebih mengilmiahkan penulisan tentang adat Minangkabau ini bisa disebut antara lain Datuk Batuah Sango, Aman Datuk Madjo Indo, Datuk Maruhum Batuah dan Bagindo Tanameh, M. Rasjid Manggis Datuk Radjo Panghoeloe, Darwis Thaib, dan Idrus Hakimi Datuk Radjo Penghoeloe.²¹ Bertolak dari keinginan untuk lebih memperkenalkan Minangkabau dengan berbagai aspek adat dan kebudayaannya, buku-buku yang ditulis para ahli ini juga beranjak dari pemikiran yang "Minangkabau-sentris". Dengan arti bahwa penulisan beranjak dari asumsi dasar akan keabshahan tradisi dan alam pikiran Minangkabau. Jadi para penulis itu, seperti para pendahulunya, adalah juga para *literate*. Justru dalam hal inilah sifat kreatif mereka kelihatan. Bagaimanakah harus diselesaikan penemuan ilmiah Barat dengan tradisi sejarah, *tambo*? Bukan methodologi dalam penyesuaian yang penting, tetapi keutuhan gambaran tradisi yang harus tetap terjaga. Dengan begini buku-buku tersebut sangat berharga sebagai gambaran dari pemikiran

19 Tetapi berdasarkan rekonstruksi teoretis "kerajaan Minangkabau", validitas sejarah dari kehadiran "Maharaja Alif" atau "Rajo Alief" ini agak disangsikan juga, lihat P.E. de Josselin de Jong, *Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-political Structure in Indonesia*. Djakarta: Bhratara, 1960 (reprint): 103-104.

20 Piteo Negeri Hardjowardjojo, *Adityawarman*. Jakarta: Bhratara, 1968.

21 Datuk Batuah Sango, *Tambo Minangkabau*. Payakumbuh: Pertjetakan Limbago.

M. Datuk Maruhum Batuah dan Datuk Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*. Djakarta: N.V. Poesaka Aseli (n.d.).

M. Rasjid Manggis Datuk Radjo Panghoeloe, *Minangkabau: Sejarah Ringkas dan Adatnja*. Padang: Sri Dharma, 1971.

Ahmad Datuk Batuah dan A. Datuk Madjoindo, *Tambo Minangkabau*. Djakarta: Balai Pustaka, 1956.

Bahar Datuk Nagari Basa, *Tambo Silsilah Adat Minangkabau*. Payakumbuh: C.V. Elonora, 1966.

Darwis Thaib Datuk Sidi Bandaro, *Seluk Belum Adat Minangkabau*. Bukittinggi: N.V. Nusantara, 1967.

Idrus Hakimi Datuk Radjo Penghulu adalah penulis adat yang paling produktif saat ini. Mungkin kedudukannya sebagai "pemelihara adat" dan Lembaga Kerapat Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mengharuskannya harus selalu tampil sebagai pembela norma dan nilai-nilai adat. Buku-bukunya antara lain:

— *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Minangkabau*. Padang: LKAAM, 1978.

— *Rangkaian Mutiara Mestika Adat di Minangkabau*. Padang: LKAAM, 1973.

berbeda-beda. Tetapi realitas bisa menjaga diri sendiri. Yang penting ialah bagaimana adat sebagai kerangka konseptual, bukan sebagai aktualitas, harus dirumuskan. Demikianlah umpamanya, pada tahun 1875 hak penghulu dan balai adat untuk mengadili masalah pidana dihapuskan oleh pemerintah kolonial.¹⁷ Tetapi kenyataan itu tidaklah mengurangi keharusan untuk mengetahui dan mendalami prinsip-prinsip hukum pidana dalam adat Minangkabau. Bukanlah keberlakuannya yang teramat penting, tetapi cara adat untuk memelihara dan menyelesaikan berbagai bentuk perbuatan yang mengganggu ketenteraman sosial. Jika seandainya perbuatan itu lebih menyangkut malu keluarga ataupun nagari, bukankah ketentuan adat yang lebih bersifat redemptif itu akan lebih bisa berfungsi? Karena itulah ketentuan-ketentuan ini selalu diulang, selalu diucapkan, selalu dikenang.

Jika penerbitan buku-buku adat biasa dipakai ukuran, saya kira sejak awal 1930-an kecenderungan ideologisasi adat telah mulai berkurang. Kegiatan partai-partai adat tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, sedangkan di kalangan penghulu telah makin banyak juga yang melibatkan diri dalam berbagai kegiatan. Perubahan sosial-ekonomi yang terjadi makin tak memungkinkan para penghulu untuk hanya menggantungkan diri pada "anak buah". Sedangkan sementara itu kesadaran bahwa Minangkabau adalah suatu keutuhan yang tunggal telah pula dikoyak-koyak. Bukan saja Islam, yang menjadi dasar yang paling fundamental dari Perminangkabauan tak bisa terlepas dari sifat citanya yang universal, tetapi juga pergerakan nasionalisme yang melanda Minangkabau sejak pertengahan tahun 1920-an, telah pula menandingi kesatuan administratif dari pemerintahan kolonial. Bahkan sampai dengan pertengahan tahun 1930-an Sumatera Barat merupakan salah satu pusat pergerakan politik kebangsaan yang radikal. Di saat ini nagari-nagari, yang secara formal tetap berada di bawah pemerintahan para penghulu dengan balai adat mereka, dimasuki oleh partai dan organisasi sukarela. Apa yang terjadi, bila berbagai laporan penjabat pemerintah bisa dipakai, ialah bermulanya "negara dalam negara". Maksudnya wibawa dan kekuasaan para penghulu adat telah disaingi oleh tokoh-tokoh partai dan organisasi.¹⁸

Dalam suasana seperti ini, tidaklah terlalu mengherankan bahwa salah satu corak yang paling menonjol dari penulisan tentang adat Minangkabau ialah makin naiknya kecenderungan informatif dan berkurangnya sifat ideologis. Sifat argumentatif makin berkurang dan kedudukan Islam atau Kitabullah sebagai dasar segala-galanya makin diperkuat. Yang menarik juga ialah bertam-

17 Tentang hal ini lihat Ph.S. Van Ronkel, "De invoering van ons Strafwetboek ter SWK naar aanteekeningen in een Maleische Handschrift", TBB, 46 (1914): 249-255.

18 Lihat Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra*. Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1971.

literati Minangkabau tentang masyarakat dan zaman lampau. Mereka memberi informasi dan, tanpa harus bersifat defensif, memperlihatkan keberlanjutan validitas dari nilai dan norma dari "alam Minangkabau".

Khusus mengenal hal yang belakangan ini barangkali buku yang ditulis oleh Prof. Nasrun bisa dianggap salah satu puncak dari dalam tradisi penulisan Minangkabau modern.²² Dalam bukunya Prof. Nasrun dengan sistematis dan menarik mencoba menghidupkan kembali "kebesaran" nilai filosofis yang in heren dalam ajaran adat Minangkabau. Ia memang tidak mempunyai orisinalitas seperti Datuk Paduko Alam, si penulis *Rancak Dilabuah*, atau Datuk Sutan Maharadjo, tetapi dengan menempatkan dirinya sebagai "perantara" — antara kebijaksanaan adat yang telah dirumuskan dengan para pembaca — Prof. Nasrun, seorang ahli hukum tatanegara, berhasil dengan baik membuat interpretasi tentang ajaran adat. Dan untuk ini ia pun mengadakan pula semacam studi perbandingan.

Hal-hal yang telah saya bicarakan di atas adalah sekadar cuplikan selintas dari sejarah pemikiran Minangkabau tentang dirinya, tentang dunianya. Tentu saja di samping mereka yang ingin memperlihatkan keberlanjutan nilai Minangkabau, bukan tak terdapat pula yang menyangsikannya. Salah satu tulisan yang pernah menghebohkan, ialah buku kecil Hamka yang berjudul *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Ditulis di tahun 1946,²³ sudah bisa diduga bahwa buku ini lebih merangsang semangat revolusioner, daripada mempertanyakan nilai dasar keminangkabauan. Buku ini lebih mengecam struktur kekuasaan adat, yang pernah dibina oleh pemerintah kolonial, dan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tak lagi sesuai dengan "zaman perjuangan". Mungin terasa agak berlebih-lebihan, tetapi buku ini lebih membayangkan hubungan "cinta" dan "benci" yang kadang-kadang sangat aneh, antara "perantau" dengan negeri kelahiran. Kritik terhadap struktur dan nilai adat lebih banyak muncul dalam obrolan di warung atau lapau, yang kadang-kadang berfungsi sebagai "balai rendah", pembanding semua tata dan norma yang dibelai-belai oleh "balai adat", tempat para ninik-mamak bermusyawarah. Meskipun hal-hal ini tak dapat digeneralisasi begitu saja, namun dapatlah dikatakan, sejak Syekh Achmad Chatib melancarkan serangan yang paling mendasar atas sistem pewarisan matrilineal Minangkabau di akhir abad 19, kritik-kritik terhadap adat Minangkabau tidak lagi bersifat fundamental. Bu-

22 Prof. M. Nasrun. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Djakarta: Bulan Bintang, 1927.

23 Diterbitkan di Padang Panjang. Seberapa jauh HAMKA "konsisten" dengan serangannya, lihat antara lain tulisannya dalam Mochtar Naim (ed.), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris*. Padang: Center for Minangkabau Studies, 1968.

Umur yang menua dan berakhirnya "situasi revolusioner" tampaknya sangat berpengaruh bagi perubahan sikap ini.

kan saja sifatnya fragmentaris, tetapi juga lebih merupakan titik terhadap sistem perilaku, yang diberi dasar adat, dan "keterbelakangan" dari para penghulu. Jika dibanding dengan periode ketika para *ideologue* adat masih bersuara lantang, maka tulisan-tulisan yang menyangsikan keberlakuan norma dan nilai adat telah jauh lebih berkurang. Barangkali kenyataan bahwa struktur kekuasaan telah makin tak berdaya, antara lain karena tiada lagi kekuasaan kolonial yang akan menahan erosi wibawa dan kekuasaan penghulu akibat perubahan sosial-ekonomis. Di samping itu, kesadaran akan makin tumbuhnya "komunitas nasional" dalam pengertian kultural, adalah pula salah satu faktor yang menentukan. Komunitas nasional yang berada dalam proses menumbuhkan identitas nasional menyebabkan unsur-unsur pendukungnya makin sadar untuk menjaga dasar esensial mereka. Tentu perlu pula dicatat bahwa hal ini juga didorong oleh pemerintah dalam berbagai kegiatan kebudayaan.

Mungkin dalam situasi ini pula berbagai seminar yang bertaraf nasional untuk mempelajari adat dan kebudayaan Minangkabau diadakan. Kegiatan-kegiatan ini mencapai puncaknya di tahun 1970. Ketika itu seminar besar tentang kebudayaan Minangkabau diadakan di Batusangkar, dekat Pagarruyung, yang konon merupakan pusat "kerajaan Minangkabau dahulu kala".

Dari uraian di atas barangkali satu hal yang menyolok bisa kelihatan, penulisan tentang adat dan kebudayaan Minangkabau, baik yang ditulis oleh para ahli adat ataupun yang ingin mengancam keberlakuan adat, bertolak dari sikap bahwa apa yang ditulis itu haruslah fungsional. Ia tak berhenti pada keinginan untuk memberitakan dan memberi penjelasan, tetapi lebih penting lagi untuk dipakai sebagai pedoman dan sistem perilaku. Karena itulah kecenderungan "Minangkabau-sentris" kelihatan jelas sekali. Karena itu bisa pula dimengerti terjadinya peralihan dalam sikap terhadap bagaimana ketentuan dan norma serta nilai adat itu harus dikemukakan. Hal-hal inilah yang menyebabkan mengapa tulisan-tulisan, yang disebut sepintas lalu di atas, tetap penting, baik sebagai bahan studi, maupun sebagai penambah pengetahuan dan pelajaran. Daripadanya kelihatan tidak sekadar "adat lama, pusaka usang", tetapi dinamik kesejarahan Minangkabau sendiri.

Studi tentang kebudayaan dan masyarakat sebagai sesuatu yang harus berfungsi dalam kehidupan sosial dan pribadi adalah salah satu ciri utama dari penulisan yang dilakukan oleh *participant* atau peserta kebudayaan. Studi atau penulisan itu tidaklah habis pada dirinya, tetapi berusaha mencari kelanjutan *relevancy* dari tradisi dalam proses peralihan sosial. Hal inilah terutama yang membedakannya dengan studi yang dilakukan oleh para peninjau, *observers*, atau mereka yang sadar menjadikan dirinya sebagai peninjau. Semacam jarak antara *actor* atau pelaku kebudayaan dengan peninjau secara metodologis dengan tegas diadakan. Yang ditinjau dan yang meninjau seakan-akan berada

dalam situasi yang saling berhadapan. Dengan begitulah mungkin "obyektivitas" yang tertinggi bisa diharapkan. Sifat fungsionalnya bukanlah sesuatu yang intrinsik dalam studi, tetapi sesuatu berada di luarnya. Setelah studi selesai, maka pertanyaan tentang "apa yang bisa dilakukan", barulah bisa diajukan dengan keras. Terlepas dari hasrat untuk mempribumikan ilmu-ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan, tradisi ilmu yang membuat jarak yang ekstrim antara sasaran penelitian dengan meneliti itu memang berasal dari Barat. Dalam hal ini, dapatlah dikatakan bahwa studi tentang Minangkabau telah makin bersifat internasional. Kecenderungan ini terutama sekali kelihatan setelah tahun 1970.

Berbagai hal tentang ini telah pernah saya laporkan.²⁴ Namun sepintas lalu dapat saya sampaikan bahwa jika di zaman kolonial studi Minangkabau praktis dimonopoli oleh sarjana-sarjana Belanda — antara lain menghasilkan setidaknya dua disertasi dan satu studi klasik dari Schrieke,²⁵ di samping puluhan artikel dan buku tebal — kini berbagai sarjana dari berbagai bangsa telah ikut serta. Maka tidaklah terlalu berlebih-lebihan sesungguhnya jika di bulan September 1980 diadakan seminar internasional tentang masyarakat, kebudayaan, dan sastra Minangkabau di Bukittinggi. Panitia seminar tak mengada-ada. Dan seminar itu menjadi "betul-betul internasional", ketika di bulan April 1981 hal yang sama juga diadakan di Amsterdam.

Tradisi penulisan ilmiah modern ini, yang umumnya lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang khusus dan lebih memperhatikan keadaan yang secara empiris bisa diperhatikan, telah menghasilkan berbagai disertasi dan buku. Meskipun sebagian terbesar studi-studi itu lebih bersifat teknis, setidaknya dua buku sejarah yang cukup populer telah dihasilkan. Yang pertama ialah buku yang dikerjakan oleh M.D. Mansur dan kawan-kawan,²⁶ yang mencoba menyelusuri sejarah Minangkabau dari masa prasejarah sampai periode mutakhir. Yang kedua dan juga jauh lebih berhasil, ialah karya Rusli Amran,²⁷ yang hampir secara *exhaustive* mempergunakan sumber-sumber tercetak Belanda. Meskipun dikerjakan oleh seorang yang resminya tidak mendapat latihan dalam ilmu sejarah, buku ini adalah buku sejarah-berkisah, *narrative*, terlengkap dari zaman Hindu sampai 1833 yang pernah diterbitkan. Kelemahan dari buku ini ialah keengganan penulisnya mempertimbangkan sumber asli dan belum sempatnya ia menggarap arsip-arsip.

Demikianlah secara sepintas lalu "peta bumi" penulisan adat dan kebudaya-

24 Taufik Abdullah, "Studi tentang Minangkabau" (Makalah pada Seminar Internasional Tentang Minangkabau, Bukittinggi, 6-8 September 1980), dimuat dalam *Majalah Nagari*, 2 (Mei 1980): 36-43.

25 B. Schrieke, "Causes and Effect" dan *Pergolakan Agama*.

26 M.D. Mansur dan kawan-kawan, *Sedjarah Minangkabau*. Djakarta: Bhratara, 1970.

27 Rusli Amran, *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1981.

an Minangkabau. Dari segi inilah kelihatan suatu keistimewaan dari buku yang dihasilkan oleh Navis. Dari sudut tradisi penulisan ia termasuk golongan yang sadar bahwa ia adalah *participant* dari masalah yang ingin dibicarakannya. Tetapi catatan-catatan yang diberikannya, lebih mengarah kepada keinginan untuk ikut serta sebagai *observer*. Lebih penting lagi sebenarnya ialah tanpa menempatkan dirinya sebagai kritikus terhadap sasaran penelitiannya, dengan jelas pula kelihatan bahwa ia bukanlah *literati* yang ingin mengelus-elus hal-hal yang ditulisnya. Apakah ini suatu pertanda pula?

Memang benar, kata pepatah *sakali aie gadang, sakali tapian baraliah*, tetapi bagaimanapun juga adat *indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh*.

Jakarta, Juli 1982

Taufik Abdullah

PENGANTAR

Waktu saya bekerja di Jawatan Kebudayaan Provinsi Sumatera Tengah pada tahun 1952 - 1955 banyak tamu yang datang mencari informasi *Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jawatan tidak dapat membantu sebagaimana mestinya, sehingga mereka dibawa kepada orang yang menurut pendapat umum adalah ahlinya. Namun, banyak pertanyaan tidak terjawab, tidak dapat dipahami, dan tidak teruji kebenarannya. Sedangkan buku yang ada, bukan saja isinya tidak memadai, melainkan juga sulit dipahami terutama oleh orang yang bukan orang Minangkabau.

Semenjak itu saya mencoba mempelajari adat dan kebudayaan Minangkabau dengan mengumpulkan bahan dan informasi dari buku-buku dan dari lapangan. Setelah saya berhenti bekerja di jawatan itu, kegiatan yang telah telanjur itu saya lanjutkan terus, meski tidak intensif. Kemudian saya mencoba menulisnya dengan tujuan memberikan informasi yang lengkap, ringkas, tetapi mudah dipahami semua pembaca. Ternyata tidaklah mudah menulis-kannya, sehingga tidak kurang dari delapan kali saya mengulanginya sampai buku ini terwujud seperti sekarang.

Tujuan penulisan buku ini bukan untuk membuahkkan karya ilmiah melainkan sekadar usaha menyampaikan informasi. Namun, saya mendapat banyak kesulitan dalam memilih bahan untuk ditulis. Kesulitan itu disebabkan antara

lain banyaknya perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial dan kebudayaan Minangkabau serta banyaknya pula tulisan dan keterangan yang tidak luput dari tafsiran menurut kecenderungan orang per orang. Oleh karena itu, cara penulisan pokok buku ini diusahakan agar betul-betul bersifat informatif, sedangkan setiap perubahan yang telah terjadi atau penafsiran yang pernah ditulis dicantumkan pada *catatan kaki* berikut referensinya. Hal ini dimaksudkan agar pembaca yang ingin memperluas dan memperdalam pengetahuannya tentang Minangkabau dapat menelusuri sumber-sumber tulisan ini dengan mudah.

Dalam memilih bahan untuk tulisan pokok digunakan pendekatan seperti falsafah Minangkabau yang berpangkal pada *alam terkembang jadi guru* dan digunakan pedoman *pepatah* serta *petitih* yang merupakan produk asli kebudayaan Minangkabau itu. Untuk berbagai pengertian yang ditimbulkan oleh berbagai istilah dan nama yang khas, ditelusuri bahasa Sanskerta yang menjadi bahasa cendekiawan Minangkabau kuno. Bahan-bahan yang tidak sesuai dengan falsafah alam Minangkabau dan istilah serta nama yang tidak ditemui dalam bahasa Sanskerta, tetapi telah menjadi bagian kehidupan dan kebudayaan Minangkabau, dicoba diuraikan pada *catatan kaki*. Dengan demikian, catatan kaki merupakan karangan tersendiri yang memuat berbagai tafsiran dan analisa.

Beberapa bab yang tidak mencantumkan referensinya berarti bahwa bab itu ditulis berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan. Sedangkan sistem penulisannya tidak luput dari analisa atau tafsiran yang bertolak dari pendekatan yang sama dengan bab lainnya.

Dalam menuliskan kalimat dan istilah digunakan dua cara. Kalimat yang khas Minangkabau, seperti peribahasa, dicantumkan sebagaimana aslinya, dalam tanda *kursif* dicantumkan alih bahasanya ke bahasa Indonesia secara harfiah, dengan tujuan untuk memelihara irama gaya sastranya, kemudian barulah diberikan penafsirannya. Mungkin penafsiran ini tidak cukup memuaskan karena terlalu pendek, sedangkan penafsiran yang memuaskan mungkin akan menjadikan uraian yang panjang. Dan hal itu tidaklah menjadi tujuan buku ini. Sedangkan nama dan istilah yang dijadikan nama ditulis dalam bentuk yang telah umum dipakai penulis lainnya.

Dengan mencantumkan gambar-gambar yang diperlukan, diharapkan buku ini dapat memberikan informasi yang memuaskan dan juga dapat menjadi pengantar untuk mengenal serta memahami adat dan kebudayaan Minangkabau.

Akhirnya kepada semua teman yang telah membantu dan mendorong saya menulis dan menyelesaikan naskah buku ini, saya menyampaikan terima kasih.

Padang, 5 Januari 1982

TAMBO

Tambo merupakan salah satu warisan kebudayaan Minangkabau yang penting. Ia merupakan kisah yang disampaikan secara lisan oleh tukang kaba¹ yang diucapkan oleh juru pidato pada upacara adat. Orang cenderung membagi tambo itu dalam dua jenis. Yakni *tambo alam*, yang mengisahkan asal-usul nenek moyang serta banggunya kerajaan Minangkabau, dan *tambo adat*, yang mengisahkan adat atau sistem dan aturan pemerintahan Minangkabau pada masa lalu.²

Dalam menyampaikan kisah tambo tidak ada sistematika tertentu. Cara mengisahkannya disesuaikan dengan keperluan dan keadaan. Sepenggal kisah tambo dapat saja dikisahkan dengan merentang panjang. Ada kalanya dikaitkai dengan adat monografi suatu nagari, tempat tambo itu sedang disampaikan. Kadang-kadang dikaitkan dengan sejarah bangsa yang mereka kenal secara selintas, seperti sejarah Melayu, sejarah Majapahit, bahkan juga sejarah Islam. Bukanlah sesuatu yang ganjil jika tambo dipandang sebagai karya sastra yang menjadi milik umum yang isi kisahnya dapat berubah-ubah menurut

-
- 1 Tukang kaba semacam traubadour di Eropa. Ia selalu berkeliling memperagakan keahliannya bercerita ke nagari yang sedang pasar, ke keramaian atau perhelatan yang diadakan orang. Uraian lebih lanjut lihat bab "Kesusasteraan" dan bab "Permainan Rakyat".
 - 2 *Tambo* berasal dari bahasa Sanskerta, *tambay* atau *tambe* yang artinya *bermula*.

kesenangan pendengarnya. Di kala tambo ditulis dan kemudian dicetak dalam bentuk buku, kebiasaan tukang kaba berkisah dilanjutkan penulisnya.³

Kisah tambo tidak mengenal jarak waktu, tetapi pada umumnya dimulai dari keberangkatan Maharaja Diraja⁴ ke Minangkabau. Tokoh yang dikisahkan berpusat pada Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang yang dimitoskan sebagai pendiri dua sistem pemerintahan Minangkabau, yang didampingi tokoh lain yang bernama Cati Bilang Pandai. Sedangkan raja-raja yang bersemayam di Pagaruyung, selain Bunda Kandung, tidak pernah disebut-sebut dalam tambo. Kisah tambo juga melukiskan kedatangan raja-raja asing yang mencoba menaklukkan mereka. Akan tetapi, nama raja-raja itu dilukiskan dengan sindiran sebagai hewan, seperti *Rusa dari laut yang tanduknya bercabang-cabang* dan *Anggang dari laut yang telornya jatuh di tanah Minangkabau*, atau nama-nama lain yang dikiaskan dengan nama yang samar.⁵

Asal-Usul

Pada awal tambo dikisahkan tiga orang putra Sultan Iskandar Zulkarnain.⁶ Yang tertua Maharaja Alif menjadi raja di benua Ruhum.⁷ Yang tengah

- 3 Tidak ada suatu kisah tambo yang sama isinya, baik yang menggunakan tulisan Arab, apalagi yang menggunakan tulisan Latin, yang baru dikenal pada awal abad ke-20 ini. Penulis tambo yang menggunakan bahasa Indonesia menambah keragaman kisah tambo, karena umumnya mereka mencoba memberikan tafsiran menurut ilmu dan orientasinya masing-masing. Kisah tambo yang pertama ditulis dengan tulisan Arab. Oleh karena itu, pengaruh agama Islam dan kisah-kisah yang bersumber dari Arab sangat dominan mewarnai kisah tambo. Sedangkan kisah tambo yang ditulis dengan tulisan Latin diberi tafsiran dengan menggunakan ilmu sejarah Nusantara dari tangan kedua atau ketiga. Bagaimanapun bercampuraduknya imajinasi, mitos, dan legenda dalam kisah tambo itu, ia masih dapat membantu para peneliti untuk mengenal kebudayaan Minangkabau. Edwar Djamaris dalam makalahnya telah mencoba menguraikan cerita tambo menurut strukturnya. Lihat Edwar Djamaris, makalah *Seminar Internasional Kebudayaan Minangkabau* dalam judul "Tambo Minangkabau, Tinjauan Struktural", Bukittinggi, 1980.
- 4 Nama-nama tokoh dalam tambo umumnya beragam, demikian pula hubungan perkawinan dan turunannya, bahkan fungsi atau peran beberapa nama bercampur aduk, seperti yang tertera dalam *Bagan Silsilah Menurut Berbagai Tambo* pada hlm. 49.
- 5 Sebagai suatu suku bangsa yang tanpa catatan sejarah, sesungguhnya hal ini agak aneh. Jika dikaji dari ajaran falsafahnya, maka sistem monarki tampaknya tidak disukai. Oleh karena itulah, nama raja-raja selalu disamarkan atau dilukiskan dengan kiasan, sehingga identitasnya hilang. Hampir boleh dikatakan seluruh kisah raja-raja dan turunannya dilukiskan dengan warna yang gelap. Bahkan tokoh yang dimitoskan sekalipun dikisahkan dengan warna yang gelap, seperti halnya Datuk Ketumanggungan dibanding Datuk Perpatih nan Sabatang atau Dang Tuanku dibanding Cindur Mata.
- 6 Iskandar Zulkarnain ialah nama lain dari Alexander Yang Agung dari Masedonia yang pernah menjarah dunia sampai ke India. Perihal pemakaian namanya dalam tambo lihat bab "Sejarah" pada catatan 34.
- 7 Benua Ruhum diidentifikasi penulis tambo sebagai Romawi Timur. Gelar Maharaja Alif seorang raja yang bukan bangsa Arab, yang ditafsirkan sebagai raja pertama, sama halnya

Maharaja Depang, menjadi raja di benua Cina.⁸ Yang bungsu bernama Maharaja Diraja, berlayar ke selatan. Bersama Maharaja Diraja, selain istri-istrinya, ikut pula Cati Bilang Pandai⁹ seorang yang arif bijaksana. Dalam pelayaran, mahkota Maharaja Diraja terjatuh ke laut dan tidak dapat diambil lagi karena mahkota itu dililit naga laut yang sangat ganas. Cati Bilang Pandai menurunkan kaca dan dari pantulan kaca itulah ia membuat tiruan mahkota persis seperti yang asli.¹⁰ Selain permaisuri, Maharaja Diraja membawa juga empat perempuan lainnya: Harimau Campa, Kucing Siam, Kambing Hutan dan Anjing yang Mualim. Nama-nama itu diberikan sesuai dengan tingkah lakunya.¹¹

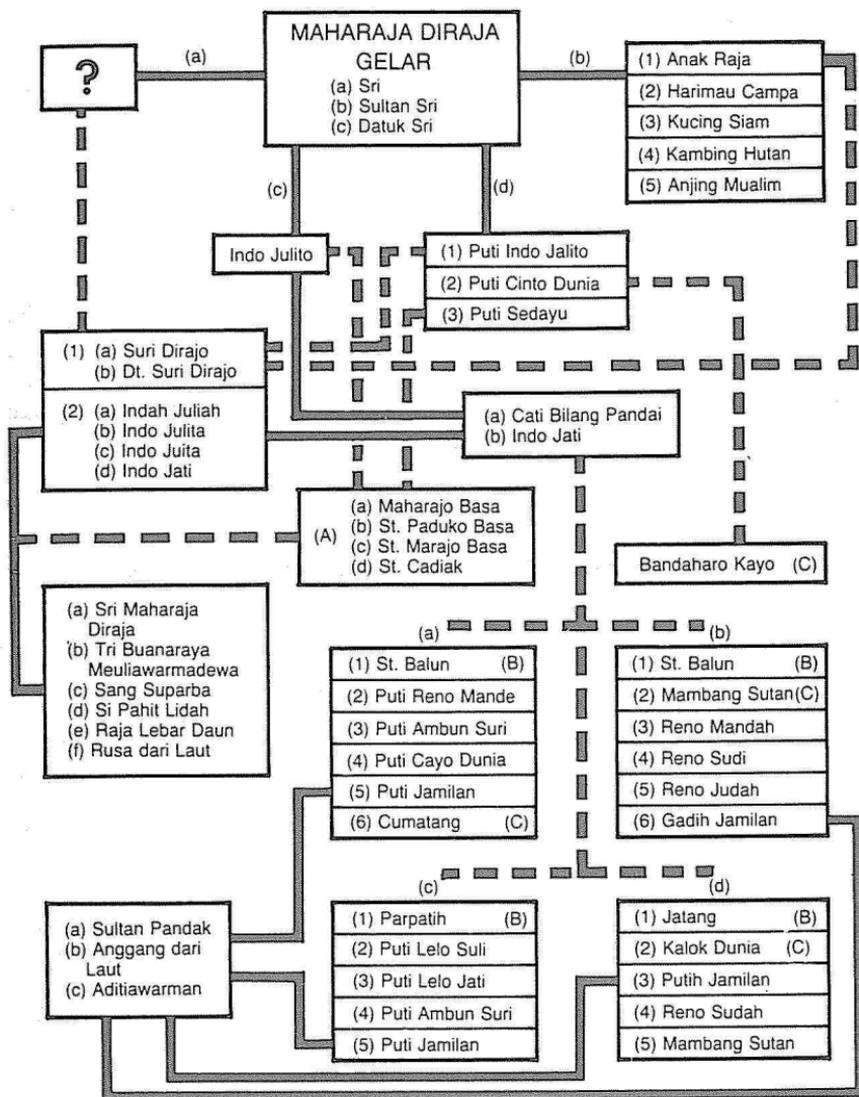
dengan penamaan atas nama raja Pagaruyung yang pertama memeluk Islam, yakni Sultan Alif. Mungkin penamaan dengan memakai abjad pertama dari abjad Arab itu dimaksudkan sebagai kiasan anak pertama Iskandar Zulkarnain.

- 8 Maharaja Depang kadang-kadang juga disebut Maharaja Dipang. Menurut tafsiran penulis tambo, pengertian *dipang* adalah *dinihari*. Jadi, penamaan itu sebagai kias bahwa Negeri Cina letaknya di timur. (Lihat M. Rasyid Manggis, *Minangkabau, Sejarah Ringkas, dan Adatunya*, Padang, Sri Dharma, 1971, hlm. 143).
- 9 Cati Bilang Pandai merupakan tokoh yang tidak terkena kurun waktu dalam kisah tambo. Ia ditafsirkan berdasarkan namanya, sebagai tokoh satria yang tersohor pandai, yang datang ke Minangkabau bersama Maharaja Diraja. Di samping itu, ia hidup bersamaan dengan masa Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang. Namun, dalam tambo, Datuk Ketumanggungan merupakan cucu, bahkan juga cicit Maharaja Diraja. Penafsir sejarah mengidentifikasi ia sebagai Wiswarupakumara yang menjadi wakil kerajaan Singosari di Minangkabau. (Lihat juga bab "Sejarah" pada catatan 23).
- 10 Peristiwa ini mengiaskan bahwa sistem pemerintahan yang dibawa dari benua Asia itu bukanlah seperti aslinya, melainkan sekadar tiruan atau adaptasi cendekiawan asli Minangkabau berdasarkan penimbaan pengalaman sendiri dan ajaran tiga unsur kebudayaan yang bertemu pada waktu penjarahan Iskandar Zulkarnain. Pembentukan nagari Minangkabau menunjukkan persamaan dengan "polis" atau kota di Yunani kuno. Persamaan itu merupakan pengaruh kebudayaan Yunani kuno. (Lihat juga M.D. Mansur dkk. *Sejarah Minangkabau*, Jakarta, Bhratara, 1970, hlm. 23). Sedangkan pengaruh kebudayaan Cina ialah sistem bersuku-suku (*clan*). Menurut sistem ini, perkawinan harus antarsuku, artinya orang yang sama sukunya tidak boleh saling mengawini. Menurut M. Rasyid Manggis (*op. cit.* hlm. 144), filsuf Cina Meng Tze (Mencius), yang hidup sezaman dengan Iskandar Zulkarnain, mengembangkan ajaran *persamaan* antarmanusia sebagai unsur alam yang berada di bawah lindungan satu langit. Unsur kebudayaan India, baik Hinduisme maupun Budhisme terlihat pada sistem Laras nan Dua. Miral Manan dalam suatu diskusi pada Seminar Sejarah Minangkabau mengemukakan teori bahwa lahirnya matrilineal itu adalah akibat perang besar yang berlangsung pada zaman Iskandar Zulkarnain. Dalam perang besar, kelahiran anak yang sah adalah dari ibunya. Hal ini berarti bahwa orang-orang yang bersaudara sekandung belum tentu seayah. Dan sesuai dengan kodrat alam yang jadi sumber falsafah Minangkabau, hubungan yang paling akrab dari semua insan di dunia adalah antara ibu dan anak.
- 11 Dari sumber kisah tambo lainnya, nama-nama itu bukanlah nama perempuan, tetapi nama-nama anggota rombongan yang mengikuti Maharaja Diraja. Tiap-tiap nama merupakan identifikasi negeri asal anggota rombongan itu. Umpamanya dari Campa, Kocin, Siam, Kambay, dan Maumein di Burma.

Setelah lama berlayar sampailah dia ke suatu tempat yang bernama Lagundi nan Beselo (Legundi yang bersila), seterusnya sampai ke Gunung Merapi, yang semula sebesar telur lalu menyentak naik, sedangkan laut menyentak turun. Kemudian dibangunlah sebuah nagari di lereng Gunung Merapi itu, yang lalu diberi nama Pariangan.¹² Karena penduduk kian banyak, dibangun lagi nagari kedua, yakni Padang Panjang. Setelah kedua nagari itu kian ramai berpindahlah penduduk mendiami tanah yang luas di sekitar Gunung Merapi. Tanah yang luas tempat kediaman baru itu dinamakan luhak.¹³ Tanah sebelah barat dinamai Luhak Agam, sebelah utara Luhak Lima Puluh dan sebelah timur Luhak Tanah Datar.¹⁴ Ketiga tanah itu dengan menggunakan perumpamaan dilukiskan sangat subur, yakni untuk Agam dikatakan bahwa *buminya hangat, airnya keruh, dan ikannya liar*. Untuk Lima Puluh dikisahkan bahwa *buminya sejuk, airnya jernih, dan ikannya jinak*. Sedangkan untuk Tanah Datar dikisahkan bahwa *buminya nyaman, airnya tawar, dan ikannya banyak*.¹⁵

-
- 12 Umumnya penulis tambo mengatakan bahwa *Pariangan* berasal dari kata *riang*. Ketika negeri itu dibangun Maharaja Diraja, rakyat sangat senang dan mereka bekerja dengan riang hati. Demikian pula dengan nama negeri Padang Panjang, karena dibangun dengan menggunakan pedang yang panjang untuk membabat semak belukar. Versi lain mengatakan negeri *Pariangan* dibangun untuk tempat kediaman seorang raja yang mereka namakan "Rusa nan Datang dari Laut" yang akan jadi semenda mereka. Mereka bekerja dengan riang karena raja, yang semula hendak memerangi mereka, kini berbalik menjadi semenda berkat kebijakan Datuk nan Bertiga, yaitu Datuk Ketumanggungan, Datuk Perpatih nan Sabatang, dan Cati Bilang Pandai. Versi lain mengatakan bahwa ular naga yang besar di tempat itu telah dibunuh "Rusa dari Laut" dengan pedangnya yang panjang, sehingga penduduk riang gembira karena terbebas dari ancaman ular naga itu. Ular naga itu dikatakan sebagai penyamaran si Kati Muno, seorang tokoh yang sakti dan menakutkan. Karena jasanya, penduduk mengangkat "Rusa dari Laut" itu menjadi raja mereka dengan gelar Sri Maharaja Diraja. Banyak penelaah tambo, di antaranya M. Rasyid Manggis, Darwis Dt. Majolelo, berpendapat bahwa *Pariangan* itu berasal dari kata *para hyang*. Sedangkan tokoh "Rusa dari Laut" ialah Sang si Purba (Sang Suparba), yaitu tokoh yang sama dengan yang disebut-sebut dalam *Sejarah Melayu* karya Tun Seri Lanang.
- 13 Umumnya penulis tambo mengatakan *luhak* sama artinya dengan *luak*, dalam bahasa Minangkabau yang artinya *kuang*. Ketika penduduk mencari permukiman baru, penduduk di tempat asal menjadi *luak*, menjadi berkurang. Jika diambil dari bahasa Sanskerta, maka *luhak* berasal dari *lwa*, artinya luas, lapang. *Luhak* merupakan suatu teritorial pemerintahan. Pada waktu pemerintah Hindia Belanda membentuk wilayah administrasi di bawah keresidenan, yang disebut *afdeeling* (kabupaten, sekarang) masyarakat menamakannya *luhak* dan asisten residen yang Belanda disebut tuan *luhak*. Lihat juga bab "Undang-Undang dan Hukum".
- 14 Menurut tambo, tiap-tiap *luhak* ditemukan dan dibangun oleh ketiga pimpinan mereka, *Luhak Agam* oleh Datuk Ketumanggungan, *Luhak Lima Puluh* oleh Datuk Perpatih nan Sabatang, dan *Luhak Tanah Datar* oleh Datuk Maharaja nan Banego-nego.
- 15 M. Rasyid Manggis menafsirkan ungkapan itu sebagai berikut. Penduduk Agam dilukiskan sebagai penduduk yang keras hati, berani, dan suka berkelahi. Penduduk Lima Puluh sebagai penduduk yang berhati lembut, tenang, dan suka damai. Sedangkan penduduk Tanah Datar

BAGAN SILSILAH MENURUT BEBERAPA TAMBO



Keterangan: : garis keturunan
 : garis perkawinan
 Abjad: menurut versi beberapa tambo
 Angka: jumlah istri atau anak

(A) : nama kecil Dt. Ketumangungan
 (B) : nama kecil Dt. Perpatih nan Sabatang
 (C) : nama kecil Dt. Sakalok Dunia nan Banego-nego

Sedangkan tempat yang pertama mereka dapati yang disebut *Lagundi nan Beselo*, dilukiskan bahwa *di sanalah pohon beringin sonsang, di sanalah bukit tak berangin, di sanalah lurak tak berair, dan di sanalah banto berayun*.¹⁶

Silsilah

Dari banyak versi tambo, salah satu mengisahkan bahwa dengan istrinya yang bernama Indah Jalito, Maharaja Diraja memperoleh sepasang anak. Yang laki-laki, yang tertua, bernama Suri Dirajo. Sedangkan yang perempuan bernama Indah Juliah. Indah Juliah menikah dengan raja yang dinamai *Ruso nan Datang dari Lauik, Makotonyo Bacabang Tigo* (Rusa yang Datang dari Laut, Mahkotanya Bercabang Tiga). Raja ini kemudian bergelar Maharaja Basa, yang setelah dewasa bergelar Datuk Ketumanggungan. Setelah Sri Maharaja Diraja meninggal, Indah Juliah menikah dengan Cati Bilang Pandai. Pernikahan ini melahirkan banyak anak. Dua orang yang terpenting ialah Sutan Balun yang kemudian bergelar Datuk Perpatih nan Sabatang. Yang seorang perempuan, Puti Jamilan. Puti Jamilan menikah dengan raja yang disebut *Anggang nan Datang dari Lauik, Ditembak dek Datuak nan Baduo, Badia Sadantam Duo Latuuhnyo, Jatuhlah Taluo Anggang ka Bumi Nangko* (Enggang Datang dari Laut, Ditembak oleh Datuk yang Berdua, Bedil Sedentam Dua Letusannya, Jatuhlah Telur Enggang ke Bumi Ini).¹⁷ Dari perkawinan ini lahirlah Bunda Kandung yang bersemayam di Pagaruyung. Bunda Kandung melahirkan Sutan Rumandung

sebagai peramah, sabar, dan suka damai. (Lihat M. Rasyid Manggis *op. cit.* hlm. 66).

- 16 Kalimat seperti itu sering ditemui dalam karya sastra Minangkabau yang sulit ditafsirkan secara tepat, seperti halnya kalimat pemeo yang sulit ditafsirkan secara harfiah. Kalimat seperti itu hanya dapat dirasakan dengan uraian yang panjang lebar dan pemahaman latar belakang falsafahnya. (Lihat juga bab "Kesusasteraan" pada bagian "pameo"). Namun, kalimat itu mungkin dapat dipahami seperti halnya memahami karya sastra Melayu yang mengisahkan negeri yang jauh dengan ungkapan *negeri antah berantah*. Secara imajiner sekalipun tidak mungkin dapat ditafsirkan makna bentuk pohon beringin yang tumbuhnya sonsang, yang uratnya menjulang ke atas, atau bukit yang tidak ditiup angin, atau lurah atau ngarai yang tidak ada air di dasarnya, atau *banto* (sejenis rumput yang panjangnya sekitar 7 cm) berayun-ayun ditiup angin seperti berayunnya ilalang. Hal yang sama diungkapkan pula dalam mengisahkan batas-batas wilayah Minangkabau seperti diuraikan dalam catatan 21.
- 17 Para penulis tambo pada umumnya saling berbeda dalam menuliskan nama-nama tokoh, periode, dan silsilah turunan, bahkan komposisi dan fungsinya. Umpamanya tambo yang ditulis Bahar Datuk Nagari Basa menyebutkan bahwa Datuk Suri Dirajo dikatakan sebagai salah seorang pengganti Maharaja Diraja. M. Rasyid Manggis mengatakannya sebagai tokoh anggota rombongan Maharaja Diraja yang pertama datang ke Minangkabau, yang juga diberi gelar Paduka Berhala. Sedangkan Djanuir Chalifah Sutan Indera mengatakan Datuk Suri Dirajo sebagai anak Maharaja Diraja. Tokoh sentral yang sama pada semua buku tambo ialah Datuk Ketumanggungan yang bersaudara seibu dengan Datuk Perpatih nan Sabatang, dan yang terakhir ini ayahnya ialah Cati Bilang Pandai, sedangkan adiknya Puti Jamilan menikah dengan raja yang digelar "Anggang dari Laut".

yang kemudian bergelar Dang Tuanku. Bunda Kandung dan Dang Tuanku terbunuh waktu diserang Tiang Bungkok. Kemudian Tiang Bungkok pun terbunuh oleh Cindur Mato. Tambo tidak melanjutkan kisahnya setelah peristiwa itu.¹⁸

Asal Nama Minangkabau

Pada suatu masa datanglah bala tentara yang dipimpin Anggang dari Laut yang hendak menaklukkan mereka. Melihat kekuatan pasukan itu, mufakatlah Datuk yang Berdua (Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang) beserta Cati Bilang Pandai untuk mencari akal bagaimana menangkis kedatangan musuh.

Akhirnya didapat kata sepakat bahwa untuk melawan pasukan yang kuat itu haruslah dengan tipu muslihat. Muslihat yang dipilih ialah mengadu kerbau.

-
- 18 Cuplikan kisah Bundo Kandung tidak ditemui dalam tambo. Ia ditemui dalam cerita kaba yang lebih terkenal dengan cerita kaba Cindua Mato. Kisah bermula dari mimpi Bundo Kandung. Ia menyuruh bujangnya, yang bernama Selamat Panjang Gombak, memanjat pohon nyiur gading yang sakti untuk mengambil buahnya. Air dua buah nyiur itu diminum Bundo Kandung. Akibatnya, Bundo Kandung pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Sutan Rumandung dengan panggilan Dang Tuanku. Seorang dayang juga meminum air nyiur itu sehingga ia hamil pula. Kemudian ia melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Sutan Kecinduan, yang lebih terkenal dengan Cindua Mato. Menurut versi lain, Cindua Mato juga anak dari Bundo Kandung yang bersama-sama dengan Dang Tuanku berayah Bujang Selamat. Oleh karena tidak lazim pisang berbuah dua kali, dikisahkan saja Cindua Mato itu adalah anak dayang-dayangnya. Dalam kisah itu diceritakan Dang Tuanku bertunangan dengan Puti Bungsu, anak mamaknya yang menjadi raja di Sungai Ngiang. Cindua Mato bertunangan dengan anak Bandaro di Sungai Tarab. Oleh karena suatu fitnah yang mengatakan bahwa Dang Tuanku telah menderita sakit lepra, Puti Bungsu ditunangkan dengan Rajo Imbang Jaya dari selatan. Diutuslah Cindua Mato ke Sungai Ngiang, menculik Puti Bungsu. Ia membawa teman-temannya yang sakti, seperti Gumarang, seekor kuda sembrani, Binuang, seekor kerbau yang buas, dan Kinantan, seekor ayam jago yang pandai terbang jauh. Penculikan berhasil. Puti Bungsu dapat dibawa ke Pagaruyung Tetapi Raja Imbang Jaya tidak senang hati. Ia mengirim panglimanya yang bernama Tiang Bungkok menyerbu Pagaruyung. Istana Bundo Kandung dihanguskan dan Bundo Kandung beserta Dang Tuanku diceritakan mikraj ke langit. Kerajaan lalu dipimpin Cindua Mato yang telah menikah dengan anak Bandaro di Sungai Tarab. Akan tetapi, kisah lain mengatakan bahwa Cindua Mato juga mikraj bersama ke langit. Menurut penduduk Lunang, di Kabupaten Pesisir Selatan sekarang, kedua ibu dan anak itu tidak mikraj ke langit, melainkan pindah ke Lunang dan memerintah dari sana hingga ajalnya. Sampai kini masih didapati kubur ibu dan anak itu. Bahkan dikatakan masih ada turunan langsungnya, yaitu seorang wanita yang semenjak usia 9 tahun telah dipanggil dengan "Mandeh Rubiah". Dalam majalah kebudayaan Minangkabau No. 10/Desember 1979, Prof. Drs. H. Amura cenderung untuk mempercayai keterangan penduduk Lunang, sehingga ia pun mengatakan bahwa kuburan yang terdapat di Lunang itu sama pentingnya dengan Borobudur. Akan tetapi Drs. M.D. Mansur, dalam majalah yang sama, yaitu No. 12/Februari 1980, sangat menyangsikan kebenaran pandangan profesor itu.

Kerbau siapa yang menang, itulah yang memenangkan pertempuran. Usul diterima oleh panglima pasukan yang datang itu.¹⁹

Pihak musuh mendatangkan kerbau yang sangat besar. Jarak kedua ujung tanduknya empat depa. Untuk menandinginya tidak ada kerbau yang sepadan. Lalu dirundingkan lagi. Cati Bilang Pandai mengajukan saran agar kerbau besar itu dilawan dengan anak kerbau yang lagi sarat menyusu. Sebelum dilepas ke gelanggang, anak kerbau itu beberapa hari tidak dibiarkan menyusu pada induknya. Pada hidungnya diikatkan sepotong besi yang runcing. Besi itu disebut *Minang*.

Demikianlah, pada hari yang ditetapkan, pihak musuh melepaskan kerbau-nya yang besar itu ke gelanggang. Kemudian pihak yang menanti melepaskan anak kerbau yang kecil itu. Ketika melihat seekor kerbau besar di gelanggang, anak kerbau itu menyangka itulah induknya. Berlarilah anak kerbau itu dan menyeruduk ke perut kerbau besar untuk menyusu, lalu tembuslah perut kerbau besar itu. Ia lari kesakitan. Di suatu kampung *tersimpuruik* (terburai) isi perutnya. Lalu kampung itu dinamakan *Simpuruik* (Simpurut). Namun, kerbau besar itu berlari terus dan sampailah ia ke kampung lain. Ia rebah dan mati.

19 Pada umumnya ada dua versi kisah kedatangan kapal-kapal itu. Versi pertama ialah yang mengisahkan bahwa Datuk Ketumanggungan ingin menyambut dengan kekerasan, sedangkan Datuk Perpatih nan Sabatang menghendaki agar disambut dengan perundingan. Versi lainnya mengatakan Datuk Perpatih nan Sabatang yang menghendaki agar disambut dengan kekerasan. Namun, kebijaksanaan dikemukakan Cati Bilang Pandai, yaitu untuk menyelidiki lebih dahulu apa yang diinginkan armada itu. Panglima armada itu mengusulkan diadakan peraduan sebagai pengganti peperangan. Usul itu diterima ketiga pimpinan yang menanti. Oleh pendatang diminta kepada penanti untuk menerka jenis kelamin anak itik yang baru dilahirkan. Teka-teki itu dimenangkan penanti dengan mengatakan bahwa anak itik yang pertama terjun ke air itulah yang betina. Versi lain mengatakan bahwa teka-teki itu mengenai anak angsa. Penanti juga menerka bahwa anak itik yang lebih dahulu dapat memasukkan kepalanya ke lubang yang berisi makanan itulah yang jantan. Kemudian pendatang mengajukan sepotong ruyung yang diraut sama besarnya untuk diterka ujung pangkalnya. Penanti dapat juga menerka dengan mengatakan bahwa yang pangkal ialah yang terbenam jika ruyung itu diletakkan ke kolam air. Namun, panglima armada itu menghendaki peraduan fisik untuk menentukan kalah menang. Cati Bilang Pandai mengajukan aduan kerbau bukan aduan manusia. Tawaran diterima. Lalu panglima armada mengirim kurir ke negeri asalnya untuk menjemput kerbau yang paling besar.

Kulit kerbau itu diambil penduduk. Dan kampung itu dinamakan Sijangkat (*sijangat* = kulit). Sejak kemenangan itu, tempat gelanggang itu menjadi kampung yang dinamai Minangkabau.²⁰

Batas Alam Minangkabau

Batas alam atau luas wilayah Minangkabau menurut kisah tambo dilukiskan dengan cara yang tidak mudah diperkirakan. Wilayahnya atau tempat-tempatnya seperti secara nyata ada, sehingga dapat menimbulkan fantasi atau tafsiran kira-kira di mana letak perbatasan itu.

Sebagaimana halnya dengan lukisan asal mula Maharaja Diraja menjejakkan kakinya ke darat, yaitu dengan kalimat-kalimat yang muskil maknanya, demikian pula cara mengisahkan perbatasan wilayah Minangkabau masa lalu. Tempat Maharaja Diraja pertama menjejakkan kakinya dikisahkan sebagai berikut: *Digalundi nan baselo, dakek bukiik siguntang-guntang, di sinan lurah satuka banang, itulah lurah nan indak baraiia, di situlah bukiik nan indah barangin-barangin, di situlah banto nan barayun, di bawah batu hamparan putih, di situlah sirangkak nan badangkuang, di situlah buayo putih daguak, di mano aia basimpang tigo*. Artinya: pohon galundi yang bersila, dekat bukit siguntang-guntang, di sana lurah setekar benang, itulah lurah yang tidak berair, di situlah bukit yang tidak berangin, di situlah rumput yang berayun, di bawah batu hamparan putih, di situlah sirangkak yang berdangking, di situlah buaya berdagu putih, di mana air bersimpang tiga.

Dengan cara dan gaya demikian pulalah wilayah perbatasan Minangkabau dikisahkan, yakni: *Dari sikilang aia bangih sampai ke taratak aia itam, dari sipisok-pisok*

20 Kampung yang bernama Simpurut, Sijangat, dan Minangkabau itu hingga kini masih ada. Oleh karena itu, peristiwa yang dikisahkan tambo itu sangat dipercayai orang Minangkabau sebagai peristiwa sejarah. Namun, penamaan atas suatu suku bangsa berdasarkan suatu peristiwa aduan kerbau tidak meyakinkan banyak penulis. Penulis Minangkabau pun mengemukakan berbagai pendapat, antara lain mengatakan bahwa asal kata *minang* dari nama besi runcing yang dipasang di ujung hidung anak kerbau. Penulis lain mengatakan bahwa asalnya dari kata *mainang kabau*, yang artinya *memelihara kerbau*. Nama Minangkabau yang tertua dalam catatan sejarah ditemui dalam *Nagarakertagama* yang ditulis pada tahun 1365 oleh Prapanca, pujangga Majapahit. Dan penulis bukan orang Minangkabau pada umumnya tidak menerima asal nama Minangkabau seperti yang dikisahkan tambo itu. Mereka umumnya lebih suka mencari sumbernya dari bahasa-bahasa yang hidup di India. Ven der Tuuk, umpamanya, mengatakan asal katanya dari *phinang khabu* yang artinya *tanah asal*. Dr. Muh. Hussein Nainar mengatakan bahwa asalnya dari *menon khabu* yang artinya *tanah mulia*. (Lihat juga M. Rasyid Manggis, *op. cit.* hlm. 41-42). Dalam buku *Sumatera Tengah*, yang diterbitkan Jawatan Penerangan Sumatera Tengah, dikemukakan juga bahwa kata itu berasal dari bahasa Sri Lanka *mau angka bahu*, yang artinya *yang memerintah*. Pendapat yang terakhir yang mengatakannya berasal dari kata *minanga tamwan*, *minanga* menjadi *minang*, *tamwan* berubah menjadi *kabau*. Kata itu ditemukan pada prasasti Kedudukan Bukit (lihat juga bab "Sejarah" pada catatan 17).

pisau hanyuik sampai ka sialang balantak besi, dari riak nan badabua sampai ka durian ditakuak rajo. Artinya: Dari sikilang air bangis sampai ke teratak air hitam, dari sipisok-pisok pisau hanyut sampai ke sialang bersengat besi, dari riak yang berdebur sampai ke durian ditekuk raja.²¹

Laras nan Dua

Tambo menyebutkan bahwa pemerintahan di Minangkabau menganut dua sistem, yaitu *Koto Piliang* dan *Bodi Caniago*.²² Sistem Koto Piliang digagaskan Datuk Ketumanggungan, sedangkan sistem yang lain oleh Datuk Perpatih nan Sabatang. Kelahiran kedua sistem itu berlatar belakang sejarah kelahiran dua tokoh itu. keduanya mempunyai ibu yang sama, tetapi berlainan ayah. Ayah Datuk Ketumanggungan seorang raja yang bergelar Sri Maharaja Diraja. Sedangkan Datuk Perpatih nan Sabatang, ayahnya pembantu utama raja yang bernama Cati Bilang Pandai. Sedari kecil keduanya telah digambarkan selalu berkelahi. Sampai dewasa pun mereka selalu bertentangan dalam menentukan sistem pemerintahan.²³ Dalam suatu adu pendapat, yang digambarkan sangat sengit dan menentukan, Datuk Ketumanggungan sampai menyentakkan kerisnya lalu menikamkannya pada sebuah batu sehingga batu itu berlubang tetapi tidak tembus. Datuk Perpatih nan Sabatang juga menyentakkan kerisnya dan menikam batu itu pula tepat pada bekas tikaman sebelumnya, sehing-

21 Banyak penulis tambo menafsirkan kalimat itu secara harfiah karena berbagai kata, seperti: sikilang, air bangis, teratak, air hitam, sipisok-pisok, dan sialang juga merupakan nama berbagai nagari. Dengan tafsiran itu diperkirakan batas Minangkabau dahulu kira-kira di sebelah barat daya ialah Air Bangis sekarang, di sebelah tenggara Desa Taratak dekat Teluk Kuantan, di sebelah utara dekat Desa Sipisok-pisok sampai ke Sialang dekat perbatasan Riau, dan di sebelah selatan di Pesisir sampai ke Desa Durian dekat perbatasan Jambi. Jadi, luas wilayah Minangkabau dilukiskan sebagaimana wilayah Provinsi Sumatera Barat sekarang. Penulis tambo lainnya menyesuaikan peta wilayah Minangkabau dengan wilayah masa jayanya dengan mengatakan bahwa desa (kini nagari) yang ditemukan dalam tambo itu merupakan batas bagian barat, utara, dan selatan saja, sedangkan ke timurnya sampai ke seluruh wilayah Riau, bahkan sampai ke Negeri Sembilan di Malaysia sekarang. Akan tetapi, bila dikaji menurut ilmu kesusasteraan Minangkabau, batas yang dilukiskan itu sama dengan pengertian "antah berantah". Misalnya, kalimat *Sikilang air bangis* merupakan suatu pengertian yang tidak dapat dinyatakan secara kongkret. Karena kilang (kincir) takkan dapat diputar rodanya oleh air yang bengis. Demikian pula halnya dengan *teratak air hitam* yang tidak dapat diartikan orang akan mendirikan permukiman yang airnya hitam, sedangkan orang memerlukan air yang jernih. Demikian pula dengan *sialang balantak besi* yang artinya lebah yang mempunyai pemantak dari besi. Atau *riak nan berdebur* yang artinya riak memecah di pantai dan berdebur bunyinya bagai gelombang laut. Padahal pengertian riak ialah alunan air yang ditiup angin lemah dan takkan memecah di pantai dengan menimbulkan suara yang berdebur.

22 Perihal asal kata Koto Piliang dan Bodi Caniago lihat bab "Penghulu" pada catatan 4.

23 Dalam kisah tambo diceritakan bahwa sejak semula Datuk Ketumanggungan bersikap kaku dan selalu tidak mau mengubah putusan. Demikianlah ketika Datuk Perpatih nan Sabatang

ga tembus sampai ke sebelahnya. Batu itu dinamakan rakyat dengan *batu batikam* yang terletak di Nagari Lima Kaum.²⁴

Karena sama-sama bertuah, keduanya pun berdamai dengan menyepakati bahwa kedua sistem itu dapat digunakan oleh nagari masing-masing, sesuai dengan pilihannya. Sistem itu dinamakan *lareh*.²⁵ Yang digagaskan Datuk Ketumanggungan disebut *Lareh Koto Piliang*, yang lain disebut *Lareh Bodi Caniago*. Kedua-duanya disebut *lareh nan duo* (laras nan dua).

Perbedaan antara keduanya ialah yang berkenaan dengan kedudukan raja dan sistem pemerintahan. Menurut Koto Piliang, raja adalah kepala pemerintahan seluruh alam Minangkabau, karena itu raja digelar Raja Alam. Menurut Bodi Caniago, raja mempunyai kekuasaan yang terbatas pada wilayah yang berbeda. Kekuasaan raja hanyalah di rantau sedangkan di luhak ia berperan sebagai lambang, seperti yang diungkapkan dalam mamang: *Luhak berpenghulu, rantau beraja*. Yang artinya kepala pemerintahan di luhak adalah penghulu, sedangkan kepala pemerintahan di rantau adalah raja.²⁶ Sistem pemerintahan

masih bernama Sutan Balun, ia ingin mengubah sanksi hukum yang bernama "tarik balas", yaitu hukuman bunuh bagi yang membunuh, dan dilukai bagi yang melukai. Datuk Ketumanggungan tidak mengacuhkan keinginan adiknya itu karena adiknya tidak punya hak apa-apa, sebab ia bukan anak raja. Sutan Balun bersedih hati. Lalu ia pergi merantau beberapa tahun lamanya. Ketika pulang, ia membawa seekor anjing. Anjing itu disuruhnya menggigit pengawal Datuk Ketumanggungan. Hukum yang adil harus dijalankan. Akan tetapi, bagaimana melaksanakan hukum "tarik balas" kepada anjing? Datuk Ketumanggungan sadar bahwa hukum "tarik balas" sudah harus diganti. Di waktu lain, Sutan Balun mengusulkan kepada kakaknya agar dalam pemerintahan dipakai sistem permusyawaratan yang keputusannya diambil dengan suara bulat. Datuk Ketumanggungan menyangka bahwa hak kepemimpinannya akan dikurangi, tetapi karena enggan mengecilkan hati adik, ia menerima saja apa yang diinginkan Sutan Balun. Kemudian alangkah menyesalnya dia dalam hati karena adiknya ternyata tetap menghendaki kepemimpinannya. Ketika suatu kesepakatan diikrarkan, Datuk Ketumanggungan memukul kerisnya dengan telapak tangannya sebagai tanda ikrarnya. Sutan Balun malah menuskkan keris itu ke batu yang telah tersedia sehingga tembus. (Lihat juga Bahar St. Nagari Basa *op. cit.* hlm. 22-26).

- 24 Menurut versi Bahar St. Nagari Basa yang menikam batu itu ialah Datuk Perpatih nan Sabatang seorang diri (Lihat catatan 23). Menurut sumber lain, pada peristiwa yang sama Datuk Ketumanggungan pun menikam sebuah batu dengan tombaknya. "Batu Batikam" itu tersimpan di Nagari Dusun Tuo (Lihat St. Mahmood, B.A., *Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*, tanpa penerbit dan tanpa tahun, hlm. 33).
- 25 *Lareh* atau *laras* yang artinya kesesuaian, seperti dalam istilah musik Jawa. *laras slendro* dan *laras pelog*. Makna dalam hal ini ialah aliran dari sistem pemerintahan.
- 26 Ada baiknya juga diketahui apa yang ditulis seorang Belanda. De Rooy, pada tahun 1889, tentang kerajaan Minangkabau dan hubungannya dengan nagari serta penghulu, sebagaimana yang dikutip Rusli Amran dalam bukunya *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang*: "Kerajaan Minangkabau tua terdiri atas daerah-daerah yang berdiri sendiri, masing-masing di bawah pemerintahan yang terdiri dari penghulu-penghulu dan semua daerah itu tunduk pada kedaulatan raja. Daerah-daerah atau nagari-nagari tidak ada hubungannya satu sama lain dan sebetulnya bebas sama sekali. Nagari-nagari juga bebas membuat hukum dan

antara keduanya pun berbeda. Menurut Koto Piliang, status penghulu bertingkat-tingkat dengan wewangnya yang bersifat vertikal, yang menurut mamang dikatakan "berjenjang naik, bertangga turun". Sedangkan menurut Bodi Caniago, status penghulu sederajat dengan kewenangan yang bersifat horisontal, seperti yang diungkapkan dalam mamang "duduk sehamparan, tegak sepmatang".²⁷

Kompromi antara kedua sistem itu terjadi pada perdamaian yang berlangsung di Lima Kaum pada peristiwa Batu Batikam. Yang pokoknya ialah: pada nagari yang didirikan penganut Koto Piliang, hukum Koto Pilianglah yang berlaku. Demikian pula hukum Bodi Caniago akan berlaku di nagari yang didirikan kaum itu. Setiap nagari berhak menentukan pilihannya masing-masing. Juga penduduk suatu nagari boleh memakai kedua-duanya.²⁸

Untuk menyatakan eksistensi *lareh* masing-masing dalam menyusun dan mengatur pemerintahan, bahkan dalam arsitektur, keduanya memperlihatkan

peraturan-peraturan dan menjalankannya sekalian, tetapi lembaga-lembaga tua dan raja sebagai dasar pemerintahan dan pembuat hukum, tetap berfungsi juga. Kekuasaan, lebih baik dikatakan kekuasaan tradisional atas semua nagari itu yang jumlahnya selalu bertambah, berpusat pada raja Minangkabau yang mereka anggap sebagai inkarnasi keturunan dan asal yang sama, yakni Pariangan-Padang Panjang, serta lembaga tua yang tumbuh daripadanya. Hanya di sinilah berada kekuasaan raja, bukan dalam bentuk pemerintahan atau pemameran kekuasaan yang disokong dari belakang oleh kekuatan nyata." Raja dalam menjalankan tugas tradisionalnya mempunyai hubungan langsung dengan nagari-nagari tanpa perantara. Rakyatnya bukan perorangan atau pribadi, tetapi *collectieven* (kumpulan, kelompok, golongan, atau mungkin apa yang disebut *kaum*, pen.), yakni nagari yang diwakili para penghulu. Oleh karena para penghulu dipilih langsung oleh rakyat, mempunyai tanggung jawab, dan mengambil keputusan-keputusan bersama, maka mereka tidaklah pernah menyalahgunakan kekuasaan. Dari luar, kerajaan bisa terlihat megah atau bobrok, tetapi organisasi nagari itu tetap utuh karena dilindungi adat. Peranan raja akan terlihat apabila terjadi perselisihan antarnagari. Meski tidak akan terjadi peperangan sampai alah-mengalahkan, kehadiran raja atau wakilnya sudah cukup alasan bagi kedua belah pihak yang berselisih untuk menghentikan perselisihan mereka. (Lihat juga Rusli Amran. *op. cit.* hlm. 53-54).

27 Lihat juga lebih lanjut bab "Penghulu".

28 Diduga nagari-nagari yang menganut kedua sistem kelarasan itu sering pula disebut *lareh* (laras). Seperti halnya di Luhak Agam, nagari-nagari yang menganut kedua sistem itu menyebut "lareh nan bunta" (laras yang bulat), sedangkan di Luhak Tanah Datar disebut "lareh nan panjang". Makna kata bunta dan panjang itu dapat dipahamkan sebagai ungkapan yang sama artinya, yakni sesuatu yang berbentuk bulat atau berbentuk panjang adalah suatu kesatuan yang utuh. Meski di nagari itu ada dua aliran, mereka tetap satu, homogen. Mungkin karena kekeliruan penafsiran, maka pemerintah Belanda, yang ingin membentuk lembaga pemerintahan yang akan mengkoordinasikan beberapa nagari, lalu membentuk suatu jabatan yang mereka namakan tuanku laras dan pada setiap nagari diadakan jabatan kepala nagari. Akan tetapi, setelah 65 tahun berjalan, jabatan tuanku laras dihapus dan diganti dengan jabatan demang (*districtschoofd*) dan asisten demang (*onderdistrictschoofd*) sejak tahun 1913. Dengan lahirnya jabatan demang itu, maka jabatan *regent* pun dihapuskan.

langgamnya masing-masing. Umpamanya, nagari yang menganut Lareh Koto Piliang membagi wilayah nagari dalam jumlah yang genap, seperti *Empat Koto*, *Enam Koto*, *Sepuluh Koto*, atau *Nan Empat* dan *Nan Enam*. Arsitektur rumah gadang dan balairungnya mempunyai lantai yang bertingkat-tingkat.

Sedangkan Bodi Caniago membagi wilayah nagari dengan jumlah yang ganjil, seperti *Tiga Koto*, *Tujuh Koto*, *Sebelas Lingkung*, dan *Tiga Belas Jorong*. Arsitektur rumah gadang dan balairungnya mempunyai lantai yang rata.²⁹

Raja Tiga Sila

Setelah periode zaman pemerintahan Datuk Ketumanggungan, Datuk Perpatih nan Sabatang, dan Cati Bilang Pandai yang lazim disebut "ninik nan batigo" (tiga serangkai), pucuk pemerintahan di Pagaruyung mempunyai struktur yang lain. Kekuasaan raja tampaknya terbagi tiga. Yakni Raja Alam yang berkedudukan di Pagaruyung, Raja Adat yang berkedudukan di Buo, Raja Ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus. Ketiganya lazim disebut *Rajo Tigo Selo* (Raja Tiga Sila). Masing-masing dengan kewenangan yang berbeda. Raja Alam merupakan kepala pemerintahan. Raja Adat memegang urusan Undang-undang dan Hukum, sedangkan Raja Ibadat memegang urusan keagamaan. Raja Adat dan Raja Ibadat lazim pula disebut dengan nama Raja Dua Sila. Pimpinan Raja Tiga Sila berada di tangan Raja Alam. Dan yang diartikan dengan Raja Alam ialah Raja Alam Minangkabau.³⁰

Basa Empat Balai

Raja Alam di Pagaruyung selaku kepala pemerintahan dibantu oleh suatu lembaga yang dinamakan *Basa Empat Balai* (Pembesar Empat Balai). Keempat pembesar yang membantu raja itu adalah seperti berikut. (1) *Bandaro di Sungai Tarab*, pembesar pemerintahan yang berkedudukan di Nagari Sungai Tarab. Ia dijuluki sebagai *Pamuncak Koto Piliang*, (2) *Andomo di Saruaso*, pembesar perbendaharaan. Ia dijuluki sebagai *Puro Panuah Koto Piliang* (Pura Penuh Koto Piliang) yang berkedudukan di Nagari Saruaso; (3) *Mangkudum di Sumanik*, pembesar keamanan yang berkedudukan di Nagari Sumanik. Ia dijuluki *Aluang Bunian Koto Piliang* (Alung Bunian Koto Piliang); (4) *Tuan Kadi di Padang Ganting*, pembesar keagamaan yang berkedudukan di Nagari Padang Ganting.

29 Perihal perbedaan arsitektur dari kedua kelurahan itu lihat lebih lanjut bab "Rumah Gadang".

30 Antara anggota Raja Tiga Sila ini selalu ada hubungan kekerabatan yang sangat dekat karena anggota kerabat mereka saling mengawini. Motivasinya boleh jadi karena hendak memurnikan darah "bangsawan" mereka. Akan tetapi, mungkin ada motivasi yang lebih kukuh, yakni menjaga struktur "tiga serangkai" kekuasaan mereka agar tidak mudah terpecah belah. Jika dalam sejarah, terutama yang diperoleh dari sumber-sumber Belanda, sering dikemukakan terjadinya perpecahan antara pusat pemerintahan itu, sebenarnya perpecahan yang terjadi

Ia dijuluki dengan *Suluh Bendang Koto Piliang* (Suluh Benderang Koto Piliang).

Sebagai pejabat tertinggi, Bandaro di Sungai Tarab dibantu enam orang gadang (enam orang besar). Bersama-sama, mereka dinamakan *Gadang nan Batujuah* (Besar yang Bertujuh). Ketujuhnya ialah: (1) *Pamuncak Koto Piliang* yang berkedudukan di Sungai Tarab dan bertugas sebagai pimpinan; (2) *Pardamaian Koto Piliang* yang berkedudukan di Simawang/Bukit Kandung yang bertugas sebagai pendamai nagari-nagari yang bersengketa; (3) *Pasak Kungkuang Koto Piliang* (Pasak Kungkung Koto Piliang) dengan kedudukan di Nagari Sungai Jambu, tugasnya ialah mengawasi keamanan dalam negeri; (4) *Harimau Campo Koto Piliang* (Harimau Campa Koto Piliang) dengan kedudukan di Nagari Batipuh, tugasnya ialah sebagai panglima perang; (5) *Samin Taruih Koto Piliang* (Cermin Terus Koto Piliang) yang berkedudukan di Nagari Saningbakar, bertugas sebagai badan penyelidik; (6) *Cumati Koto Piliang* (Cemeti Koto Piliang) dengan kedudukan di Nagari Sulit Air, bertugas sebagai pelaksana hukum; (7) *Gajah Tongga Koto Piliang* (Gajah Tunggal Koto Piliang) dengan kedudukan di Nagari Silungkang, bertugas sebagai kurir.³¹

Wilayah di luar luhak yang dipimpin penghulu pada nagari yang berstatus otonomi dinamakan wilayah rantau. Statusnya langsung di bawah raja alam. Dalam mamang diungkapkan dengan *luhak bapangulu rantau barajo* (Luhak berpenghulu rantau beraja). Kepala pemerintahan di wilayah rantau adalah orang yang diangkat raja, yang pada umumnya adalah anggota kerabatnya sendiri, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan. Panggilan atas kepala pemerintahan itu tidak seragam. Tampaknya disesuaikan dengan panggilan setempat yang telah ada sebelumnya. Umpamanya *Raja Muda* di rantau Indrapura, *Rajakacik* di Padang, *Bendahara* di *Kampar*, dan *Tan Tuah* di Indragiri.³²

adalah antara anggota Basa Empat Balai yang masing-masing mempunyai kewenangan mengutip "emas manah" (upeti) dari raja-raja bawahan yang berkuasa di rantau, atas nama Raja Pagaruyung. (Lihat juga bab "Sejarah").

31 Struktur pucuk pemerintahan yang dilukiskan tambo ini sama dengan struktur pucuk pemerintahan Majapahit. Lihat bab "Sejarah" pada bagian "Zaman Pagaruyung".

32 Lihat A. Dt. Batuah & A. Dt. Madjoindo, *Tambo Minangkabau*, Jakarta, Balai Pustaka, 1957.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Gaffar. "Sebuah Tinjauan tentang Arsitektur Minangkabau", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Abdul Samad Idris, Datok. *Hubungan Minangkabau dengan Negeri Sembilan dari Segi Sejarah dan Kebudayaan*, Seremban, Pustaka Azaz Negeri, 1970.
- Alfian. "Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesepian", *Manusia dalam Kemelut Sejarah*, Jakarta, LP3ES, 1979.
- Arby Samah. *Seni Ukir Tradisional Minangkabau*, arsip Bidang Kesenian Kantor Wilayah Dep. P. dan K. Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- Asmaniar Z. Idris. "Kerajaan Minangkabau Pagaruyung" Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970.
- Bahar Dt. Nagari Basa. *Falsafah Pakaian Penghulu*, Payakumbuh, Eleonora, 1966.
- Bahar Dt. Nagari Basa. *Tambo dan Silsilah Adat Alam Minangkabau*, Payakumbuh, Eleonora, 1966.
- Bank Nasional 40 Tahun*, Bukittinggi, 1970.
- Batuah, A. Dt. dan A. Dt. Madjoindo. *Tambo Minangkabau*, Jakarta, Balai Pustaka, 1957.
- Batuah Sango, Dt. *Tambo Alam Minangkabau*, Payakumbuh, Limbago, 1954.
- Berg, C.C. *Lintasan Sejarah Majapahit, Indonesia 1952*
- Boechari. *An old-Malay Inscription of Sriwijaya at Palas Pasemah (South Lampung)*,

Praseminar Penelitian Sriwijaya. Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional. Jakarta, 1979.

- Boestanal Arifin Adam. "Musik Tradisional Minangkabau", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau di Batusangkar*, 1970.
- Chidir ALi. *Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1972.
- Daramin Dt. Madjo Indo nan Gadang. "Kedudukan Sungai Jambu di tengah Lembaga Adat Minangkabau", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau di Batusangkar*, 1970.
- Darwas, D. Dt. Rajo Malano. *Filsafat Adat Minangkabau*, Yayasan Lembaga Studi Minangkabau.
- Darwis Thaib Dt. Sidi Bandaro. *Seluk Beluk Adat Minangkabau*, Bukittinggi, Nusantara, 1965.
- Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Tengah. *Propinsi Sumatera Tengah*, Bukittinggi, 1955.
- Edwar Djamaris. "Tambo Minangkabau, Tinjauan Struktural", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi 1980.
- Ensiklopedia Indonesia*. Bandung — 's-Gravehage, W. Van Hoeve.
- Ensiklopedi Indonesia (I)*. Jakarta, ichtiar Baru-Van Hoeve, 1980.
- Gazalba. "Pokok-Pokok Pikiran tentang Konflik dan Penyesuaian Antara Adat, Agama, dan Pengaruh Barat", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Islam di Minangkabau*, Padang, 1969.
- Gunawan, I. dan J. Banunaek. "Peranan Faktor Sosial-Budaya dalam Gangguan-Gangguan Jiwa pada Orang Minangkabau", *Djiwa*, I, 1968.
- Hamka. *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Jakarta, Fa. Tekad, 1963.
- Hamka. *Ajahku*, Jakarta, Djajamurni, 1960.
- Hamka. *Antara Fakta dan Khayal 'Tuanku Rao'*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.
- Hamka. *Sejarah Islam di Sumatera*, Medan, Pustaka Nasional, 1950.
- Hamka. *Kenang-Kenangan Hidup I* Jakarta, Bulan Bintang, 1979.
- Hamka. *Tenggelamnya Kapal van der Wijck*, Bukittinggi, Nusantara, 1966.
- Hanafiah S.M, A.M. *Tinjauan Adat Minangkabau*, Jakarta, 1970.
- Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Islam di Minangkabau*, Padang, 1969.
- Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Himpunan Makalah Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan Minangkabau*, Bukittinggi, 1980.
- Hurgronje, Snouck C. *De Atjehers*, Leiden, E.J. Brill, 1893.
- Hurgronje, Snouck C. *Islam di Hindia Belanda*, Jakarta, Bhratara, 1973.
- Ibenzani Usman. "Seni Ukir Tradisional Minangkabau dalam Konteks Adat

- Istiadat", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Iskandar Kemal. "Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies Press.
- Ismail Suny. *Bunga Rampai tentang Aceh*, Jakarta, Bhratara, 1980.
- Jahja. "Hukum Waris dan Tanah dan Praktek-Praktek Pengadilan", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies Press.
- Januir Khalifah St. Indera. "Sejarah Kerajaan Inderapura". *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Johns, A.H. *The Kaba Rantjak Dilabueh: A Specimen of Traditional Literature of Central Sumatra*, Ithaca, N.Y, Cornell University, 1958.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Jambatan, 1971.
- Madjelis Tahkim. *Adat Contra Islam, Mosi Besar Partij Sjarikat Islam Indonesia*, 1934.
- Mahmoed, St. BA. dan A. Manan Rajo Pangulu. *Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*, tanpa penerbit dan tanpa tahun.
- Mahmud Junus. *Sejarah Islam di Minangkabau (Sumatra Barat)*, Jakarta, Al Hidayah, 1971.
- Mansoer, M.D., dkk. *Sedjarah Minangkabau*, Jakarta, Bhratara, 1970.
- Maruhum Batuah, A.M. Dt. dan H. Dt. Bagindo Tanameh. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Jakarta, Pustaka Aseli, 1956.
- Mattulada. "Minangkabau dalam Kebudayaan Orang Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Miral Manan. *Aturan Alam: Mengenal Kembali Adat Alam Minangkabau*. (stensilan).
- Mochtar Naim. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies, 1968.
- Mochtar Naim. *Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1979.
- Moens, J.L. *Buddhisme di Jawa dan Sumatra dalam Masa Kejayaan Terakhir*, Jakarta, Bhratara, 1974.
- Moens, J.L. *Crivijaya, Yava en Kataha*, TBG LXXVII, 1937.
- Mohammad Hasbi. "Talikerabat-Talikerabat pada Kekerabatan Orang Minangkabau", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Mohammad Said. "Sejarah Minangkabau dengan meminjam dan memper-

- gunakan Karya Penulis Asing", Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970.
- Mohammad Sjafei. *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta, CSIS, 1979.
- Mohammad Zain, St. *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta, Grafica. .
- Muhammad Amir. *Bunga Rampai*, Medan, 1938.
- Muhammad Radjab. "Kesusasteraan Kaba di Minangkabau", Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970.
- Muhammad Radjab. *Perang Paderi*, Jakarta, Balai Pustaka, 1954.
- Muhammad Radjab. *Sistem Kekeberatan di Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies, 1969.
- Muhammad Radjab. *Tjatatatan di Sumatera*, Jakarta, Balai Pustaka, 1949.
- Muhammad Yamin. *Atlas Sedjarah*, Jakarta, Djambatan, 1956.
- Muhammad Yamin. *Gajah Mada*, Jakarta, Balai Pustaka, 1977.
- Muhammad Yamin. *6000 Tahun Sang Saka Merah Putih*, Jakarta, Balai Pustaka, 1956.
- Muluk Nasution, A. *Pemberontakan Rakyat Silungkang, Sumatera Barat 1926-1927*, Jakarta, Mutiara, 1981.
- Nasroen, M. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta, Bulan Bintang, 1971.
- Navis, A.A. "Korelasi Agama Islam dan Adat Minangkabau dalam Pembangunan", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Islam di Minangkabau*, Padang, 1969.
- Navis, A.A. "Sastra tradisional Minangkabau", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Padang, 1970.
- Navis, A.A. "Meninjau Masalah Adat Minangkabau dalam Novel Indonesia" *Budaya Jaya*, No. 99/1976.
- Navis, A.A. "Kaba: Cerita Rakyat Minangkabau", *Pertemuan Sastrawan Nusantara III*, Kuala Lumpur, 1981.
- Navis, A.A. "Sekitar Kesenian Minangkabau Tradisional" *Pertemuan Seniman se-Sumatera Barat*, Padang, 1981.
- Navis, A.A. "Tingkah laku Gerakan Politik di Sumatra Barat" *Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau*, Bukittinggi, 1980.
- Nooteboom, C. *Sumatra dan Pelayaran di Samudera Hindia*, Jakarta, Bhratara, 1972.
- Optimis*, Majalah no. 25/Februari 1982.
- Pitono Hardjowardojo, R. *Adityawarman*, Jakarta, Bhratara, 1966.
- Purbatjaraka, R. NG. *Riwayat Indonesia I*, Jajasan Pembangunan, 1952.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.
- Rasjid Manggis, M. Dt. Radjo Panghoeloe, *Minangkabau, Sedjarah Ringkas dan Adatnya*, Padang, Sri Dharma, 1971.

- Rusli Amran. *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang*, Jakarta, Sinar Harapan, 1981.
- Sangguno Diradjo, Dt. *Tambo Alam Minangkabau*, Jakarta, Balai Pustaka, 1954.
- Sanusi Pane. *Sejarah Indonesia II*, Jakarta, Balai Pustaka, 1965.
- Schriek, B.J.O. *Pergolakan Agama di Sumatra Barat*, Jakarta, Bhratara, 1973.
- Slamet Muljana. *Kuntala, Sriwijaya dan Suwarnabhumi*, Jakarta, Idayu, 1981.
- Slamet Muljana. *Nagarakertagama dan Tafsir Sejarahnya*, Jakarta, Bhratara, 1979.
- Soekmono. "Sekali Lagi tentang Lokasi Sriwijaya", *Praseminar Penelitian Sriwijaya*, Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, Jakarta, 1979.
- Soekmono. "Tinjauan Sejarah Kuno Minangkabau Berdasarkan Peninggalan Purbakala", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Stoddard, L. *Dunia Baru Islam*, Jakarta, Pembangunan, 1979.
- Sjafnr Abu Nain, "Pakaian Adat Minangkabau", *Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau*, Bukittinggi, 1980.
- Toorn, J.L. van der. *Aanteekeningen uit het Familieleven bij den Maleier in de Padangsche Bovenlanden I & II*, 1817.
- Umar Junus. "Kaba dan Sistem Sosial Minangkabau: Suatu Problem", *Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau*, Bukittinggi, 1980.
- Syed Ameer Ali, *Api Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1978.
- Wojowasito, S. *Kamus Kawi — Indonesia*, CV. Pengarang.
- Zuber Usman. "Fungsi dan Peranan Bahasa dan Sastra Minang dalam Kebudayaan Lokal maupun Nasional", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Zuber Usman. *Kesusasteraan Lama Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung, 1957.
- Zuber Usman. "Orang Talang Mamak", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.

Indeks

A

Abbasiyah, Dinasti 25
Abdul, Muhammad 40, 42
Abdurrauf, Syekh 27
Aceh 22, 23, 25-7
adaik babuhua sentak 87
Aditiawarman 11, 14-6
adok 273
Agam, *luhak* 31, 33-5, 48, 105, 134
Ahmad, Haji Abdullah 39, 40, 42
Ahmadsyah, Sultan 18
aka 97
Alahan Panjang, *nagari* 31, 33, 35, 37
Alam Minangkabau 59
Alamsyah, Sultan Bagagar 20, 23
Alamsyah, Sultan Muning 20, 31
alam takambang jadi guru 59, 69, 264
Ali, Khatib 42
Alif, Maharaja 46
Alif, Raja 18
Alif, Sultan 17, 18, 26
Aluang Bunian Koto Piliang 57
Ambon 22
Amoghapasa, *arca* 11, 15, 26
Amrullah, Haji Adul Karim 39, 42
anak silek 265
Ananggawarman 16
Andalas 35
Andomo 24
Andomo di Saruaso 57
Anesecritus 4
Anggang nan Datang dari Lauik 50
angku-angku, golongan 264, 283
Anjing yang Muallim 47
arato gantuang 153
Argyre *lihat* Kota Perak
Aryadamar *lihat* Aditiawarman
Arya Wangsadiraja *lihat* Aditiawarman
As-Salib, Sultan Malik 25
Aur, Tuanku Lubuk 31
Aziz, Khalifah Umar bin Abdul 25

B

babiliak ketek babiliak gadang 71, 81
badikaa 274
Bagagarsyah, Sultan Alam 20, 31, 34
bagindo 108, 133
bajulo-julo 75
bakarano bakajadian 60, 80, 172
bak pituah urang tuo-tuo 260
balah bubuang 174
balairung 188, 189, 252, 255
Balaputra 8
Balun, Sutan 50
Bandang, Dato Ri 28
Bandaro di Sungai Tarab 57, 58
Bangkinang 3
Bank Nasional 43
bansi 279, 281
Banten 21
Banuhampu, *suku* 122, 129
Bapak Wartawan Melayu 41
Barapi, Tuanku 31
Barus 15, 24, 25, 27
Basa Empat Balai 17, 31, 57
basandiang 204
baso-basi 262
Basyah, Sentot Ali 34
batagak gadang 146
Batanghari, *sungai* 6, 10, 15, 16, 18, 37
Batangkampar, *sungai* 7, 15, 18
Batavia *lihat* Jakarta
batimbang tando 199
Batipuh, *nagari* 17, 36, 58
Batu Batikam 55, 56
Batusangkar 33, 37
Batutah, Ibnu 26
Bendahara di Kampar 58
Bendang, *suku* 129
Bjaro, Tuanku 31
Bodi Caniago 54-7, 92, 123-5, 178
Bodi Caniago, *kelarasan* 129, 144, 188
Bonjol, Tuanku Imam 31, 34, 36

buang 115
Bukittinggi 34, 35, 37
Bunda Kandung 46, 50, 51
Bungsu, Tuan lihat Aditiawarman
Buo, kerajaan 17, 19, 28, 35, 37, 57
Burhanuddin, Syekh 26, 27

C

Camir Tanah Koto Piliang 58
Candung 31
Canking, nagari 27-9, 31, 38
Cati Bilang Pandai 46, 47, 50-2, 54, 57, 250
catur rakrian 16
cemo 112
Cianjur 36, 37
Cindur Mato 51, 249, 273, 275
Cingkuk, pulau 23
cino buto 198
Cola, kerajaan 9, 10
Cuci, suku 123
cultuur stelsel 37
Cumati Koto Piliang 58
cupak 90
cupak diisi limbago dituang 128

D

Dalima, suku 124
Dalu-dalu 36
dampeang 268
Dang Tuanku lihat Rumandung, Sutan
darmajaksa yang berdua 16
Darmasraya 10-2, 26
Datuk Bandaro 31
Datuk Batuah, Haji 42
Datuk Ketumanggungan 46, 50, 51, 54, 57, 92, 122, 175, 250
Datuk nan Sakelap Dunia 122, 123, 129, 175
Datuk Perpatih nan Sabatang 16, 26, 46, 50, 51, 54, 57, 92, 122, 175, 250
Datuk Sutan Maharaja 41, 42
debus . 278, 280
Depang, Maharaja 47
deta saluak 107
Dewa Tuhan Prapatih 16
Diaz, Thomas 19
Digul 43
Diniyah Putri 282

Diniyah School 40, 42
dipatuan 18
Diponegoro, Pangeran 33, 34
dubalang 106
dusun 94

E

Enggano, pulau 21

F

Fansuri, Syekh Hamzah 27
Fort de Kock 37
Fort van der Capellen 33, 37

G

gadang 134, 143
Gadang, Tuan 36, 37
gadang bagilia 144, 145
gadang kayu gadang bahannyo 76, 82
gadang lagak 76
Gadang nan Batujualih 17, 58
Gadiah, Tuan 20
Gadis, Tuan 31, 32
gadis gadang 210
gadis gack 210
Gajah Mada 12, 14-6, 26
gajah maharam 174, 175
Gajah Tongga Koto Piliang 58
galanggang 190
Gama, Vasco da 21
gambus 282
Gandhara 5
ganti lapik 198
Goa, Raja 28
golden khersonese 4
gonteh pucuah 209
Gresik 21
Gudam, suku 123
Guguk Sigandang 35
Galung Tuanku 31
Gunung, nagari 32

H

habih adaik bakarelaan 140
Harimau Campa 47

Harimau Campa Koto Piliang 58
Harimau nan Salápan 31
Hayam Wuruk 15, 16
hereanggundang 262
Hikayat Raja-Raja Pase 26
hinggak mancakam tabang manimpu 128
hutan laleh 151

I

Ilalang 24
Ilappai 27
indang 278, 280, 282
Indragiri, *kerajaan* 17
Indrapura 15, 17, 18, 23
Indraswari *lihat* Petak Dara
INS Kayutanam 43, 282
Islam
 masuk Aceh 26
 masuk Filipina Selatan 26
 masuk Sulawesi Selatan 28
 menyebar di Sumatera Barat 26-8
Ismail, Syekh 38, 41

J

Jabadicu *lihat* Jawadwipa
Jakarta 18, 32-4
Jalito, Indah 50
Jambak, *suku* 122, 123, 129
Jambek, Haji Jamil 39
Jamilan, Puti 50
janang 253, 268
jariah manantang buliah 155
Jawadwipa 4
Jayakarwang 11
Jayanagara 11, 14, 15
Jayawisnuwardani 15
Jingga, Dara 11
Juliah, Indah 50
julo-julo 154

K

Kaba 243, 244, 251, 252, 265, 272, 273, 276
kabau haji masuk parak haji 72
kabuang batang 209
kahuripan 15

Kamang, *nagari* 31, 33, 5, 37
Kambing Hutan 47
Kampai, *suku* 130.
Kantoli *lihat* Kuntala, kerajaan
Kapau, *nagari* 33
Kapau, Tuanku 31
Katiagan 33
kato 98, 99
kato malereang 262
kato marandah 207
kato nan ampek 230
kawin wakil 198
Kerinci 3
Kertanegara, Raja 10-2.
ketek banamo gadang bagala 132
Khaidir, Nabi 18
Khalifatullah, Sultan 18
Khatib, Syekh Ahmad 39, 41, 42
Kubuang Tigo Baleh, *luhak lihat* Solok, kabu-
 paten
 Kucing Siam 47
Kuntala, *kerajaan* 5, 6
Kuntu, *kerajaan* 15, 26
kurenah kato 100
kusuik bulu ayam 72
Kuti, Pemberontakan 14
Kutianyir, *suku* 122, 125, 129

L

Lagundi nan Baselo 48, 50
lambang urok 209
Lamuri 25
langgam kato 101
lanjari 177, 179, 180
lareh 55, 56
lareh nan duo 55
Lawas, Tuanku Ladang 31
Lelo, Tuanku 31
Lho Semawe 25
Lima Kaum, *nagari* 55
Limo Puluh Koto, *luhak* 33-5, 48, 105
Lintau, Tuanku 29-31, 33, 34
lipek pandau 174
Lokitarwarman, Sri Maharaja 24
Luar, Tuanku Padang 31
Lubuk Alung 37
Lubuk Ambalau 34
Lufti, Mochtar 43

luhak 104, 105, 229
luhak nan tiga 107, 123

M

Madagaskar 3, 24
Madrasah Irsyadunnas 282
maelo kayu 182
Maharaja Basa lihat Datuk Ketumanggungan
Mahat, *kampung* 7
Majapahit, *kerajaan* 11, 13
 ekspedisi ke Pase 26
 sistem pemerintahan 16, 17
Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minang-
 kabau (MTKAAM) 43
Makassar 22
Malaei Colon 5
Malaka, *kota* 21
Malaka, Tan 42
malakok 150
malam bainai 201
malawan dunia urang 62, 69, 72, 80, 82
Malayapura 10, 15
Maluku 21
mamaga 81, 82
mamak 130, 131
mamak kepala alek 253-5
mancatak tiang tua 182
Mandahiling, *suku* 122, 125, 129
Manggopoh 37
Mangkudum di sumanik 57
menjalang 203, 206
Mansiangan, Tuanku 29-31, 33, 35
mantu 106
mantri katrini 16
marah 108, 133
Marapalam, *bukit* 33
marapulai 199-208, 269
Mataram, *kerajaan* 8
Matur, *nagari* 34, 35
Mauliawarmadewa lihat Aditiawarman
Mauliawarman 10, 12
Melayu, *suku* 122-5, 129
Merapi, *gunung* 26, 27, 33, 48, 104
Meurah Silu lihat As-Salib, Sultan Malik
Minang 52
Minangkabau
 adat 88-90, 179-81

 aktivis muda 42, 43
 asal usul nama 52, 53
 aspek perekonomian 149, 150, 153-6
 aspek wilayah 53, 104, 105, 151-3
 dikuasai Belanda 34, 36
 dikuasai kaum Paderi 32
 etika hidup 65-8, 72, 73, 76
 filsafat alam 59, 60, 78, 79, 255, 256
 filsafat manusia 61-5, 69, 80-3, 95-8, 179,
 257, 258
 gaya bahasa 98-104, 229-31, 246, 247
 gelar 130-5
 gerakan politik Islam 41, 42
 hasutan komunis 38
 hukum adat 112-8
 kebudayaan lisan 45, 46
 kekerabatan 221-8
 kesenian 281, 282
 masuknya Islam 26-8, 30
 menentang rodi 37
 perang saudara 18-20, 23
 pembaharuan ajaran Islam 38-42
 pengaruh asing 263, 264, 281, 282
 perdagangan masa VOC 18, 19, 22, 23, 32
 perlawanan terhadap Belanda 23, 24, 34-7
 sistem kemasyarakatan 69-72, 74-8, 106-9,
 119, 120, 130, 258
 sistem kesukuan 121-7, 129, 130
 sistem pemerintahan 54-8, 94, 105, 106
 sistem pendidikan Islam 40
 undang-undang 91-3, 109-12
 warisan 158-65
Miskin, Haji 29, 30
Moro 26
Muara Panas 37
Muaratakus, *candi* 7, 10
Muawiyah, Khalifah '24
Muda, Iskandar 23
Muhammadiyah 43
Muhammadsyah, Sultan 18, 23
Muko-Muko 18
Musi, *sungai* 7, 8, 10

N

Nagari
Nambi, Pemberontakan 14
nan Tuangga Magek Jabang 274
Napoleon, Perang 20

nikah ganggang 197
ninik nan batigo 57

O

Ophir, *gunung* 3
Orang nan Empat 29

P

Padang 23, 24, 31, 32, 133, 201
Padang Candi 15
Padang Ganting, *nagari* 57
Padang Sibusuk 16, 17
Padangpanjang 36, 48
Paderi
 menguasai Minangkabau 32
 pembersihan umat Islam 29, 32, 38
 perlawanan terhadap Belanda 33-6
Pagaruyung, *kerajaan* 10, 15, 16, 18-20, 23, 24,
 46, 50, 57, 91, 107, 123
 dikuasai kaum Paderi 32
 masuknya Islam 26
 pusat kerajaan 31
 sistem pemerintahan 17, 28, 29
panca ring wilwatika 16
Painan, Perjanjian 23
palambok talabuah 147
Palembayan 34
pamacah tubo 67
Pamaluyu, Ekspedisi 10
Pamuncak Koto Piliang 57, 58
pananti 201
Pandai Sikat 29, 30, 33
pandeka 265, 266
panibo 200, 201
paningkah 280
Pantar 35
panungkek 135, 143
Perdamaian Koto Piliang 58
parewa, golongan 264, 281, 283
Pariaman 23, 33, 133
Pariaman Tiku 108
Pariangan 27, 48
Partai Nasional Indonesia (PNI) 43
Pasak Kungkuang Koto Piliang 58
Pasaman 31, 33, 34
Pasaman, Tuanku *lihat* Lintau, Tuanku
Pase 25, 26

patahankan 81
Patapang, *suku* 122, 129
Pauh 23, 24, 37
pegang gadai 165
Pelita Kecil 41
Pemedanan 189
penghulu
 gelar 132-5
 jabatan 131, 136, 138, 139, 143-5
 pakaian 142, 143
 pantangan 140-2
 pidato penobatan 253, 254
 upacara penobatan 145-7
penghulu pucuk 94
penghulu suku 106
perkawinan
 aspek sosial 210, 211, 213-9
 hukum 195-7
 mahar 200, 201
 peminangan 199, 200
 perjamuan 209
 pola 193-5
 tata-cara 197-9, 203-8, 269
Persatuan Dagang Indonesia (Persdi) 43
Persatuan Guru Agama 42
Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) 43
Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 43
Persatuan Ulama Sumatera 42
perut 106
Petak, Dara 11
Pinawan, *suku* 123
Piobang, Haji 29
plakat panjang 35
Polo, Marco 25
Pono *lihat* Burhanuddin, Syekh
Prasasti Kedudukan Bukit 7
Ptolomeus, Claudius 4, 5
pulang ke mamak 194
punggawa 106
pupuk batang padi 268-70, 279
Puro Panuah Koto Piliang 57
pusako 158, 160
pusako batolong 226
pusako rendah 162
putuik 117

R

Rachias 4
Raffles, Thomas Stanford 20

Raja Adat 28, 57
 Raja Alam 57
 Raja Dua Sela 17
 Raja Hitam 37
 Raja Ibadat 28, 57
 Raja Muda 58
 Raja Putih 24
 Rajakacik 58
 Rajapatni 15
 Raja Tiga Sila 17, 19, 28, 57
 rajo babandiang 107, 175, 176
 rang mudo 208
 Rangga Lawe, Pemberontakan 14
 rangkiang 187
 rantau 104, 105, 107, 108
 Rao 34
 raso jo pareso 73, 74, 76, 196
 Rasyod, Syahbilal 43
 rebana 280, 282
 regent 36, 37
 renah, Tuanku nan 29, 30, 33
 Rokan, sungai 15
 ruang 174, 177
 Ruhum 46
 rumah baanjuang 175, 176
 rumah batingkok 175
 rumah gadang
 arsitektur 172
 aspek kekerabatan 223-6
 fungsi sosial 176-81
 jenis 174, 175, 188, 189
 motif hiasan 183-6
 tata cara pendirian 181-3
 Rumandung, Sutan 50, 51
 Ruso nan Datang dari Lauik lihat Datuk Keru-
 manggungan

S

Sabak 24
 Sadeng, Pemberontakan 13
 saduo 155, 156
 Saidi, Anwar St. 43
 Sailendra 8
 saiyo sakato 76, 77
 sako 158, 160
 salawat dulang 282
 Salo, suku 129
 salung 275, 279, 281

sanak sudaro 230
 sandaro 166
 Sang Dewaraya lihat Aditiawarman
 Sanggaramawijaya, Sri Maharaja 10
 Saningbakar, nagari 58, 273, 275, 276
 sapanuk 223, 224
 saptapatri 17
 Sarekat Dagang Islam 42
 Sarekat Usaha 42
 Sarikat Adat Alam Minangkabau (SAAM) 42
 Sarikat Islam 42, 43
 Saruaso, nagari 17, 18, 24, 57
 sasaran 190
 Sekolah Adabiyah 40, 42
 Sewatang, Patih 26
 si tinjau lauik 107, 174, 176
 sidi 108
 Siguntur 10, 15
 Sijangek 53
 sijombang 274
 Sijunjung 31, 37
 silat lintau 266
 silat pauh 266
 silek 174
 Silungkang, nagari 38, 42, 58
 Simabur, nagari 32
 Simabur, Tuanku lihat Ismail, Syekh
 Simawang 20, 31, 32, 34, 58
 Simpuruik 52
 sindia 262
 Singasari lihat Majapahit
 Singkarak, danau 20
 Singkawang lihat Singkuang
 Singkuang, suku 122, 125, 129
 Sintuk 18, 27
 Sipisang 34, 35
 sirih dalam carano 128
 sitaralak 266
 salo, suku 122
 sofisme 41
 Solok, kabupaten 34, 36, 37, 105
 Sri Maharaja Diraja 10, 20, 25, 46, 50, 53, 54
 Sriwijaya, kerajaan 6, 8, 10, 24, 25
 suarang 165
 Sukarno 43
 Sulit Air nagari 58
 Suluah Bendeng Koto Piliang 58
 Sumanik, nagari 17, 29, 57
 Sumatera Thawalib 41-3

Sumpah Palapa 13
Sumpur Kudus 17, 28, 57
Sungai Jambu, *nagari* 58
Sungai Pagu 37
Sungai Puar 34, 35
Sungai Tarab 17, 24, 57, 58
surambi papek 107, 175, 176, 179
Suran, Putri 18
surau 189
surau, *golongan* 264, 283
Suri Dirajo 50
sutan 108
Sutan, Taher Marah 43
Suwarnabhumi, *kerajaan* 9, 10
Suwarnadwipa 4, 5
Syafei, M. 43, 282
Syarif, Peto *lihat* Bonjol, Tuanku Imam

Tiang Bungkok 51
Tidore 22
Tiku 23
Tilatang, *nagari* 33
tirai takambang 147
Tribuanaraya Mauliawarmadewa *lihat* Aditiawarman
tuah kato 99
Tuan Kadi di Padang Ganting 57
tuduh 111
Tunggal, Khatib *lihat* Bandang, Dato Ri
tungganai 106, 131, 180, 224
Tuo, Tuanku nan 29, 31
tuo dusun 94
tuo kampung 106
Tupai Janjang 276
Turki Muda 42

T

Tajadi, *bukit* 36
takanai baragiah 76
Talang, *gunung* 105
talibun 237
Tambangan 35
Tambusai, Tuanku 36
Tan Tuah 58
Tanah Datar, *luhak* 20, 31, 33-5, 48, 105, 123
Tanca 14
Tandikat, *gunung* 34
Tang, Dinasti 25
Tanjung, *suku* 123, 124
Tanjung Barulak, *nagari* 31
tansa 278, 280
Tapanuli 35
Tarantang Gadang 34
taratak 9
Tarekat Canking 38
Tarekat Naksabandiyah 38-43
Tarekat Satariyah 27, 28, 39, 41
Tarekat Ulakan 38
Tarekat Wujudiyah 24, 28
telempong 269, 270, 272, 280
tembilang besi 159
tenggang raso 74
Ternate 22
Thaib, Jalaludin 43
Thawalib School 40

U

Ulakan 23, 27, 28, 37
ulayat 151, 152
umbuak umbai 111
Ummayah, Dinasti 25
Undang-undang Delapan 109, 110
Undang-undang Dua Belas 109, 111, 112
Undang-undang Dua Puluh 89, 109
Undang-undang Luhak dan Rantau 89
urang ampek jinih 145, 148
urang awak 70
urang kurang 157
urang nan ampek 106
Usmaniyah, Khalifah 30

V

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 22

W

Wahabi, *kaum* 30
Walmiki 4
warih bajawek 223
warih dijawek 144, 145
Waruyu, Tuan *lihat* Aditiawarman
Wijaya, Raden 11, 14, 15
Wisnu, Raja 8
Wiswarupakumara, Mahamenteri 11

Y

Yahya, Haji 39, 41, 42

Yakub, Ilyas 43

Z

Zulkarnaen, Iskandar 4, 18, 24, 46